



**LAPORAN PENELITIAN
KEILMUAN MANDIRI BIDANG ILMU UNTUK
PENGAYAAN BAHAN AJAR**

**KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI E_GOVERNMENT PADA
PEMERINTAH KOTA DEPOK**

Oleh:
**Meita Istianda
Darmanto
Murni Rachmatini**

**PUSAT KEILMUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
2007**

KATA PENGANTAR

Peran Teknologi Informasi dewasa ini telah membuka tatanan baru dalam proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat. Transaksi yang diharapkan adalah transaksi yang mengusung nilai-nilai demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas.

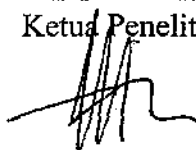
Melalui kajian tentang implementasi e_government pada Pemerintahan Kota Depok, Peneliti mengharapkan akan mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan e_government. Dengan mengetahui kendala tersebut, Peneliti ingin memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan e_government agar keberadaannya sesuai dengan niat yang diusungnya.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, mudah-mudahan penelitian dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini atau pun pihak lain yang ingin memperkaya wawasan tentang implementasi e_govt pada segmen pemerintahan.

Pondok Cabe, 27 November 2007

a.n. Tim Peneliti

Ketua Peneliti



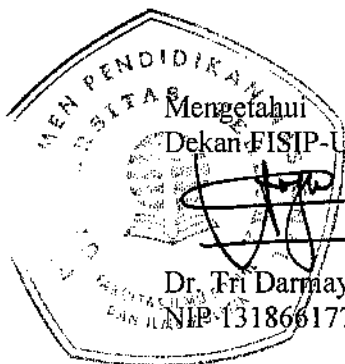
Meita Istianda, S.IP, M.Si

NIP 131652013



Lembar Pengesahan
Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Judul Penelitian : Kajian terhadap Implementasi E_government pada Pemerintah Kota Depok
2. a. Mata Kuliah : Perilaku Organisasi
b. Bidang Kajian : Ilmu Sosial
3. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap & Gelar : Meita Istianda, S.IP, M.Si
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Pangkat, Golongan, N I P : Penata, III/c, 131652013
d. Program Studi/Jurusan : Administrasi Negara/Ilmu Administrasi
e. Fakultas : ISIP
f. Alamat rumah : Bukit Pamulang Indah Blok F8 No.5 Ciputat 15417
g. Nomor Telepon/HP : (021) 7424742 / 0856 9985807
h. Email : meita@mail.ut.ac.id
4. Nama Anggota Peneliti :
1. Drs. Darmanto, M.Ed.
2. Dra. Murni Rachmatini, M.Si
5. a. Periode Penelitian : 2007
b. Lama Penelitian : 8 (delapan) Bulan
6. Biaya Penelitian : Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)



Mengetahui
Dekan FISIP-UT

Dr. Tri Darmayanti, MA
NIP 131866177

Mengetahui
Kepala Pusat Keilmuan-UT

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si.
NIP 131476464

Pondok Cabe, 28 November 2007

Ketua Peneliti

Meita Istianda, S.IP, M.Si
NIP 131652013



Mengetahui
Ketua LPPM-UT

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP 132002049

ABSTRAK

Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu pemerintahan kota yang telah memiliki inisiatif dalam menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan. Keseriusan memanfaatkan TI ini, ditunjukkan dengan membuat *E_government* Pemkot Depok melalui *Web Site* www.depok.go.id. Pembuatan *Web Site* Depok telah dilakukan melalui kajian dan studi bandung terlebih dahulu, salah satunya dengan Pemerintah Daerah Sragen. Walaupun telah melalui kajian dan studi banding, ternyata tampilan yang muncul tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat, bahkan pimpinan Pemkot Depok sendiri. *Web site* Pemkot Depok baru sebatas formalitas dalam mengimplementasikan Inpres No. 3 Tahun 2003 yang mengikat seluruh lembaga pemerintah. *Web site* Pemkot Depok statis, tidak interaktif, sajiannya usang, dan belum menampilkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana implementasi *e_government* pada Pemkot Depok melalui pertanyaan: Bagaimana kebijakan pengembangan *E_govt* Pemkot Depok? Bagaimana organisasi dan tata kerjanya? Bagaimana kesiapan SDM pengelola *E_govt* Pemkot Depok? Adakah dukungan dari Pimpinan? Bagaimana pendanaannya? Serta bagaimana sarana dan prasarananya.

Dengan mengetahui permasalahan dalam implementasi *e_government* pada Pemkot Depok diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kualitas *e_government* Pemkot Depok. Selain itu, penelitian ini juga untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan TI sebagai jembatan membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan meletakkan supremasi hukum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar dan Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Signifikansi Penelitian dengan Bahan Ajar	5
 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	 7
A. Pengertian E_government dan Implementasinya	7
B. E_government Sarana untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	10
 BAB III METODE PENELITIAN	 12
A. Populasi dan Sampel	12
B. Teknik Pengumpulan Data	12
C. Analisis Data	13
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Web Site Pemkot Depok	14
B. Gambaran Umum Responden	23
C. Analisis Deskripsi Variable Penelitian	26
D. Penjelasan per Variable Penelitian	27
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 38
A. Kesimpulan	38
B. Rekomendasi	43
 DAFTAR PUSTAKA	 45

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar a.1.	Fitur Selamat Datang Web Site Depok	14
Gambar a.2.	Fitur Profil Kota Depok	15
Gambar a.3.	Fitur Perda	16
Gambar a.4.	Fitur Direktori	16
Gambar a.5	Fitur Surat Pembaca	18
Tabel 4.1.	Umur Pegawai	23
Tabel 4.2.	Jenis Kelamin	24
Tabel 4.3.	Tingkat Pendidikan	25
Tabel 4.4.	Masa Kerja Pegawai	25
Tabel 4.5	Dukungan Pimpinan	28
Tabel 4.6.	Kompetensi Operator	30
Tabel 4.7.	Pendanaan	31
Tabel 4.8.	Sarana dan Prasarana	32
Tabel 4.9.	Kondisi Ruangan	33
Tabel 4.10.	Tampilan	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Halaman Identitas Peneliti	47
Lampiran 2	Surat Pemberitahuan Penelitian dari Pemkot Depok	48
Lampiran 3	Format Observasi Lokasi	49
Lampiran 4	Pedoman Wawancara untuk Pimpinan	50
Lampiran 5	Kuesioner untuk Operator	51
Lampiran 6	SK Walikota Depok No.53 Tahun 2004	52
Lampiran 7	Perda Depok No. 16 Tahun 2003	53
Lampiran 8	Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003	54

Universitas Terbuka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di abad ke-21 Teknologi Informasi (TI) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam segenap kehidupan manusia. Melalui TI manusia dapat melakukan transaksi baik nasional maupun internasional, berkomunikasi, memproses suatu kebijakan, bahkan dapat pula mempengaruhi opini dunia terhadap kebijakan suatu negara. Marzuki (2006) menyatakan bahwa TI memang menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparan.

Penggunaan TI tidak saja menguntungkan umat manusia, tetapi juga membuka konsekuensi pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya TI jarak yang jauh diminimalkan; peristiwa di belahan dunia barat dalam hitungan detik dapat diketahui belahan dunia timur, demikian sebaliknya. Namun di balik itu TI juga dapat mempengaruhi masyarakat di negara lain untuk menerima hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui, menjadikan masyarakat itu mengetahuinya. Sehingga membuat masyarakat itu menuntut suatu hal yang sebelumnya tidak terjadi menjadi terjadi. Misalnya tuntutan akan perubahan sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi desentralistis, keinginan untuk mewujudkan demokratisasi, transparansi dan sebagainya. Keinginan untuk mewujudkan itu, acap kali menimbulkan instabilitas karena proses perubahan menggunakan cara-cara yang demonstratif dan destruktif. Peristiwa Mei 1998 di Indonesia dapat menjadi contoh.

Penggunaan TI yang fenomenal dan mengglobal merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar oleh masyarakat di belahan bumi mana pun di abad ini. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global akan membawa suatu bangsa ke dalam jurang *digital divide* yaitu terisolasi dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi (Inpres No.3/2003). Oleh karenanya perhatian setiap masyarakat dunia terhadap perkembangan TI diwujudkan dalam World Summit for Information Society (WSIS) Desember 2003 di Jenewa, di mana telah dihasilkan dua dokumen penting yaitu, *declaration of principles* dan *plan of action*. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan secara garis besar bahwa setiap negara diharapkan mampu mengeluarkan *National e-strategy* pada

tahun 2005. Tujuan dari *e-strategy* ini adalah bagaimana agar kebijakan dan strategi suatu negara dalam mendayagunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mampu membantu negara tersebut membuat suatu perubahan yang signifikan.

Mengacu pada hasil Deklarasi WSIS tersebut, Indonesia yang pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju pemerintahan yang demokratis, transparan, dan meletakkan supremasi hukum, harus mampu dan mau menggunakan TI dalam menjalankan segenap aktifitas ke pemerintahannya. Hal ini senada dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif (Marzuki, 2006). Upaya pemerintah menjadikan TI sebagai jembatan membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan meletakkan supremasi hukum dikembangkan melalui *e-government* atau sering juga disingkat *e_govt* dan disahkan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Artinya dengan adanya Inpres, maka penerapan *e-government* mengikat seluruh lembaga yang ada. Sehingga dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diwajibkan mengembangkan *e-government*. Pengembangan *e-government* pada pemerintah daerah signifikan dengan UU No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan yang efisien dan efektif.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, dan pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2003, salah satu pemerintah daerah yang telah memiliki layanan *e_govt* adalah Pemerintah Kota Depok dengan alamat *web site*: www.depok.go.id. *Web site* pemerintahan Depok ini berisi Sejarah Kota Depok, Pemerintahan, Kelembagaan, DPRD, Potensi Daerah, Perda, Berita, Pendidikan, Demografi. *Web site* ini memiliki *link* dengan RPJMD, TPA Cipayang, dan Jawaban Walikota Depok. Bila alamat *web site* (situs) ini dikunjungi, maka masyarakat akan disajikan tentang sejarah kota Depok, kemudian pada situs pemerintahan, masyarakat akan disugahi Renstra Depok, indikator kinerja, arah kebijakan, dan Properda. Pada situs kelembagaan tersaji struktur organisasi dan unit-unit kerja. Pada situs DPRD-nya tersaji foto-foto wakil rakyat berikut nama dan jabatannya. Selanjutnya pada situs Perda tersaji sederetan judul Perda dan nomor Perda.

Mengamati *Web site* Depok dan mengkaitkannya dengan tujuan pengembangan *e_govt* yang diinginkan Inpres No.3 Tahun 2003, ataupun UU No.32 Tahun 2004, atau mengacu pada Deklarasi WSIS masyarakat dunia, maka masih jauh dari yang diharapkan.

Marzuki, (2006) berpendapat pengembangan *e_government* diarahkan untuk mencapai: a) pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. b) pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. c) pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. c) pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Berdasarkan tayangan yang tersaji pada *Web site* kota Depok, maka jelas *Web site* tersebut masih sebatas usaha formalitas pemerintah kota Depok dalam merespon Inpres No. 3 Tahun 2003. Implementasinya belum memenuhi sasaran sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan sumber penyebab tidak berfungsinya *e_govt* kota Depok sebagaimana yang diharapkan masyarakat, sesuai Inpres No. 3 Tahun 2003, ataupun ketentuan Deklarasi WSIS Jenewa tentang *National e_strategy*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sajian *Web site* Pemkot Depok, belum mengadopsi kepentingan masyarakat luas terutama layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya bagaimana alur membuat SIUP, IMB; berapa biaya yang dibutuhkan. Di mana harus membuatnya, siapa yang harus dihubungi. Kemudian saluran komunikasi antara masyarakat dengan jajaran lembaga pemerintahan (Pemda) sangat tidak maksimal. Memang ada layanan Jawaban Walikota Depok, tetapi layanan ini sifatnya tidak terkelola secara *up to date*. Sehingga masyarakat disajikan jawaban yang usang. Usaha pemkot Depok untuk mengedepankan transparansi, tidak muncul di Portal ini. Ada suatu usaha yang ditunjukkan melalui situs berita di mana ditayangkan Pengumuman Lelang. Namun hal ini belumlah cukup, karena yang diinginkan

masyarakat adalah layanan yang dapat diakses seluruh masyarakat seperti pembuatan KTP, akte kelahiran, pengurusan IMB dan sebagainya yang langsung menyentuh keperluan personal masyarakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap portal kota Depok, ditemukan permasalahan yang mengemuka adalah sebagai berikut:

- a. *Web site* kota Depok baru sebatas pajangan
- b. Informasi yang disajikan usang
- c. Informasi yang disajikan belum menyentuh layanan publik, misalnya memberikan informasi yang transparan mengenai biaya pengurusan suatu perijinan

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan umum yang akan dicoba dijawab melalui penelitian ini adalah :

BAGAIMANA IMPLEMENTASI *E_GOVT* PADA PEMKOT DEPOK?

Secara khusus pertanyaan penelitian meliputi:

- 1) Mengapa *Web site* Pemkot Depok baru sebatas pajangan?
- 2) Mengapa informasi yang disajikan usang?
- 3) Mengapa Informasi yang disajikan belum menyentuh layanan publik?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian secara detail maka pertanyaan yang akan ditanyakan adalah

- 1) Bagaimana kebijakan pengembangan *E_govt* Pemkot Depok?
- 2) Bagaimana organisasi dan tata kerjanya?
- 3) Bagaimana kesiapan SDM pengelola *E_govt* Pemkot Depok?
- 4) Adakah dukungan dari Pimpinan?
- 5) Bagaimana pendanaannya?
- 6) Bagaimana sarana dan prasarannya?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi implementasi *e_govt* Pemerintah Kota Depok.
- b. Menganalisis permasalahan dalam implementasi *e_govt* Pemerintah Kota Depok
- c. Memberikan rekomendasi pelaksanaan *e_govt* yang sesuai dengan Deklarasi WSIS Jenewa, Inpres No. 3 Tahun 2003, dan kebutuhan masyarakat.

Manfaat Penelitian:

- a. Bermanfaat bagi organisasi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki *e_govt* sebagai bagian pelayanan kepada masyarakat
- b. Bermanfaat bagi Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan mutu pengelolaan *e_govt*.
- c. Dapat digunakan sebagai tambahan materi (bentuk-bentuk kasus) bagi Buku Materi Pokok matakuliah Perilaku Organisasi, Administrasi Pemerintahan Daerah, ataupun kebijakan publik.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN DENGAN BAHAN AJAR UT KHUSUSNYA MATAKULIAH PERILAKU ORGANISASI

Melalui kajian penelitian ini akan diperoleh pemahaman bagaimana perilaku administrasi/organisasi Pemkot Depok terhadap penerapan *E_govt*. Mengacu pada tulisan Soebagio dkk pada Penjelasan tentang Perilaku Administrasi dalam modul Perilaku Organisasi, dikatakan bahwa perilaku administrasi didasarkan pada pemahaman bahwa organisasi meliputi kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan mencapai sesuatu dengan menggunakan:

- Teknologi
- Struktur
- Proses kerja

Untuk melihat perilaku organisasi dapat dilihat dengan mempelajari perilaku manusia dalam ruang lingkup organisasi. Manusia dalam perilaku organisasi dianggap sebagai subjek dan objek dan sekaligus faktor dari perubahan yang dibuat oleh manusia. Pengetahuan tentang perilaku individu dalam organisasi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kemampuan organisasi dan administrasi.

Universitas Terbuka

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian E-Government dan Implementasinya

Conrad dalam Rahardjo (2001), mengatakan *e-government* (*e_govt*) merupakan istilah yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya memberikan sesuatu yang terbaik kepada pengguna jasa. Santoso (2005), menyatakan bahwa pengembangan *e_govt* diartikan sebagai upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Konsep efektif dan efisien ini menurut Santoso senada dengan tujuan dikembangkannya *e_govt* yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung *good governance*.

Swastika (2003) menyatakan pada prinsipnya *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain, baik terhadap masyarakat, kalangan bisnis maupun sesama pemerintah, sehingga munculah istilah-istilah baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Inter-agency relationship*).

Mengenai implementasinya, Agung (2003), menyatakan implelementasi *e_govt* kebanyakan dimulai dari layanan yang sederhana yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) agar hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Mengacu pada konsep World Bank, penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelayanan publik memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungannya dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak lain yang berkepentingan. Upaya mewujudkan konsep *good governance* melalui *e_govt* ini diarahkan pada pemanfaatan internet.

Pemanfaatan internet sebagai basis pelayanan publik pada masyarakat dinilai memiliki keberhasilan, sebagaimana dinyatakan Rahardjo (2001) apabila asset utama suatu *e-government* di antaranya adalah citra dan reputasi pemerintah di mata publik, keyakinan

publik akan akurasi transaksi, keyakinan publik akan ketahanan/kehandalan transaksi terhadap kecurangan, nilai finansial dari transaksi, kemampuan untuk meresolusi persengketaan tanpa keraguan dan dalam waktu yang singkat dengan usaha minimal, kemampuan untuk meng'*enforce*' kontrak melalui proses hukum menggunakan bukti-bukti yang diterima.

Sementara itu mengacu pada pendapat Javaladi (2006), pengembangan *e_govt* dinyatakan berhasil apabila telah melalui tahap:

1. Instansi pemerintah mempunyai *website* yang dapat menyajikan informasi standar, seperti tentang organisasinya, tupoksi, berita penting, siaran pers, dan data statistik.
2. *Website* pemerintah mampu memberikan komunikasi interaktif baik internal maupun eksternal terhadap masyarakat, di mana pada tahap ini telah terjalin komunikasi internal (instansi pemerintah), maupun eksternal (masyarakat luas). Di sini masyarakat luas sudah dapat mencari informasi maupun memberikan masukan kepada instansi yang bersangkutan.
3. *Website* telah mampu memfasilitasi transaksi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat tanpa masyarakat tahu liku-liku birokrasi di belakangnya misalnya, dalam kaitannya dengan jasa perbankan, nasabah dapat memindahbukukan tanpa perlu ke Bank.
4. *Website* telah mampu melakukan komunikasi terintegrasi dengan unit lain.

Tolok ukur lain dari keberhasilan implementasi *e_govt* menurut pendapat Albarda (2004) adalah pada para pengambil keputusan. Pemahaman terhadap visi organisasi dan pengetahuan dalam visi TI dari pimpinan, saling terkait dalam menentukan jenis perangkat TI yang akan diimplementasikan dalam mendorong kemajuan organisasinya. Selain itu ia menyatakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi adalah ketersediaan perangkat. Kebutuhan perangkat harus selalu disesuaikan dengan tingkat kemajuan organisasi. Faktor *availability* dan keandalan perangkat menjadi bagian penting karena aspek ketergantungan juga makin besar. Artinya terus dilakukan evaluasi kebutuhan perangkat.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan SDM dari organisasi dalam mengoperasikan dan memelihara system agar dapat berfungsi optimal dan

berkesinambungan. Kemampuan dan keandalan system yang tinggi dalam jangka panjang menjadi kurang berpengaruh apabila kemampuan SDM dalam organisasi tidak ditingkatkan. Terjadinya perubahan budaya kerja baik secara individu, kerjasama, maupun keseluruhan organisasi juga menjadi aspek yang tidak kalah penting.

Dalam Inpres No.3 Tahun 2003, dicantumkan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :

- a. *E-Leadership*; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
- b. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
- c. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
- d. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
- e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan teknologi informasi merupakan bagian utama dalam proses transformasi organisasi/pemerintahan, karenanya manajer tingkat puncak atau top level dari organisasi sangat berperan penting dalam membangun dan mengembangkannya. Dalam kerangka kerja tata kelola implementasi teknologi informasi ada empat kelompok yang harus diperhatikan, yaitu: top level

manajemen, departemen, pengembang, dan pengguna. Dengan demikian jelaslah bahwa SDM merupakan bagian yang juga penting dalam proses implementasi *e_govt*.

B. *E-Government* Sarana untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah

Tugas dan fungsi utama pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dalam rangka membantu kebutuhan-kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nurcholis mengatakan, pelayanan atau pelayanan publik merupakan produk dari pemerintah daerah (Nurcholis, Hanif 2005).

Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk dalam pelayanan publik antara lain adalah kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban, bantuan sosial, penyiaran, dan lain-lain yang dapat mensejahterakan masyarakat (Nurcholis, Hanif 2005). Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk dapat memuaskan masyarakat maka dalam memberikan pelayanan publik pemerintah daerah harus berpijak pada nilai-nilai yang dipegang oleh rakyat atau penduduk yang tinggal di wilayahnya beserta harapan-harapan dan kepentingan mereka.

Di atas telah dijelaskan bahwa pengembangan *e-govt* diartikan sebagai upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung *good governance*. Implementasi *e-govt* itu sendiri kebanyakan dimulai dari layanan yang sederhana yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) agar hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Oleh karena itu implementasi *e-govt* di lingkungan pemerintah daerah/pemerintah kota ini apabila sesuai dengan harapan-harapan dan kepentingan masyarakat setempat akan memberikan manfaat, memuaskan, dan pada gilirannya mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, menurut Kinanto, T dalam “Layanan Publik” (2006) terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan dan diwujudkan, yaitu:

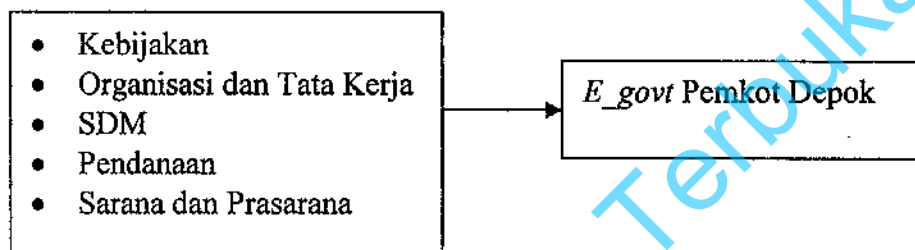
1. Kebijakan : apakah kebijakan dalam pemberian pelayanan memang sudah benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat;
2. Kelembagaan: apakah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelembagaan juga menyangkut struktur organisasi, tata nilai dan tata laksana;
3. Sumber Daya Manusia (SDM): yaitu apakah SDM yang memberikan pelayanan juga telah memiliki kompetensi tertentu, karena saat ini telah terjadi perubahan-perubahan nilai dimana masyarakat merasa memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. (Layanan Publik Edisi XV/2006)

Untuk dapat mengembangkan kapasitas aparatur daerah dalam meningkatkan pelayanan publik menurut Kinanto, T. (2006) diperlukan: 1) perubahan paradigma yaitu orientasi kerja aparatur daerah tidak lagi pada organisasi tetapi kepada kebutuhan dan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik; 2) aparatur daerah adalah “alat” untuk melayani publik, bukan sebaliknya publik yang harus melayani mereka. Paradigma ini harus tercermin dalam kesadaran peran dan tertuang dalam budaya organisasi pemerintah daerah. Setiap orang yang menduduki setiap posisi dalam struktur organisasi, harus sadar tentang peran yang harus dijalankan yaitu melayani masyarakat. Budaya organisasi harus diperkuat sehingga setiap anggota organisasi pemerintah daerah mempunyai referensi nilai yang sama, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. (Layanan Publik Edisi XV/2006).

Berdasarkan uraian di atas, apabila pengembangan e-govt ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung good governance, maka secara bersama-sama dan serentak ketiga dimensi tersebut di atas harus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena rasa ingin tahu Peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam implementasi *e_govt* di kota Depok. Metode deskriptif ini, sebagaimana pendapat Irawan (1999), digunakan bila kita ingin meneliti satu atau dua aspek dari suatu hal yang sudah terpetakan secara umum dan luas, maka kita masuk ke area penelitian yang mendalam. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Model pengkajian penelitian ini sebagai berikut:



Variabel independen: kebijakan, organisasi dan tata kerja, SDM; pendanaan, sarana dan prasarana.

Variabel dependen: Implementasi *e_govt* di kota Depok.

Objek penelitian

Objek penelitian adalah implementasi *e_govt* di kota Depok

Populasi/Sampel

Karena yang akan diteliti adalah implementasi dari *e_govt*, maka populasi/sampel dari penelitian ini tidak ada. Tetapi untuk mengetahui bagaimana *implementasi* dilaksanakan maka digunakan responden. Irawan (1999), menyatakan tidak semua penelitian memerlukan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kualitatif dan studi kasus. Tetapi semua penelitian pasti mempunyai objek penelitian. Semua penelitian pasti mempunyai sumber data.

Responden

Responden adalah seluruh pegawai pemerintah kota Depok yang terkait dengan pengelolaan *e_govt* dan pengguna layanan *e_govt*. Pegawai ini terdiri dari operator komputer, programmer, atasan, pemelihara jaringan. Selain responden, beberapa sumber data juga dijadikan bahan untuk penelitian seperti infrastruktur komputer, buku catatan atau pun bahan manual operator komputer yang dijadikan rujukan pengelolaan *e_govt*, dan sistem administrasi.

Penentuan ukuran dan teknik sampling untuk responden

Teknik sampling dilakukan melalui random berstrata (*stratified random*), pemilihan responden diaplikasikan pada responden yang berstrata. Responden diambil dari tiap-tiap lapis atau strata dari responden tersebut (pegawai).

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk menjangkau informasi/data mengenai pengelolaan *web site*. Data itu diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner dan interview/wawancara yang terstruktur, serta observasi.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari kombinasi berdasarkan keragaman data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Hasil analisis data dideskripsikan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari *e_govt* di kota Depok. Untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Web site Pemkot Depok

a. Tampilan Web site

Web site Pemkot Depok telah tertayang di internet sejak tahun 2005 dengan alamat Web site (situs) www.depok.go.id. Secara umum tampilan web site tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar a.1



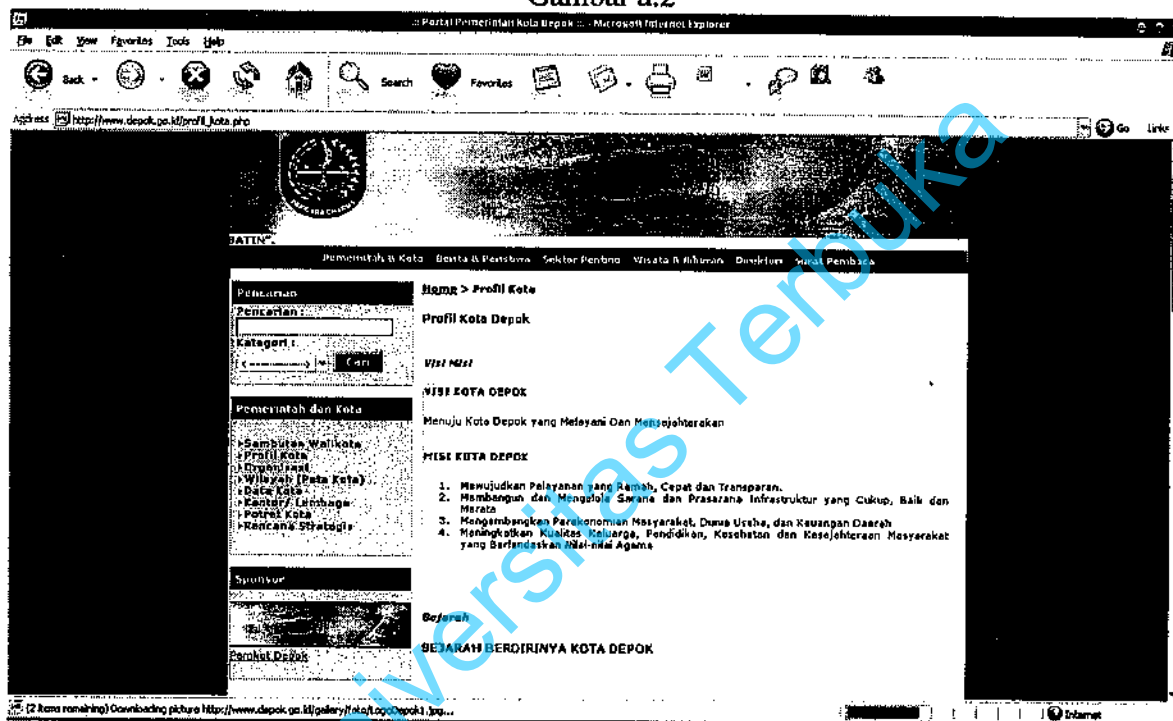
Kondisi per 15 November 2007

Bagian atas (kepala) situs ini berisi gambar lambang Kota Depok, dan Gerbang Kota Depok. Di bawahnya, terdapat kalimat berjalan (*running text*) yang dapat diubah sesuai dengan peristiwa ataupun informasi-informasi sebagai sapaan kepada pengunjung. Misalnya, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 H". Di bawah kalimat berjalan terdapat menu (fitur) Pemerintah dan Kota, Berita dan Peristiwa, Sektor Penting, Wisata dan Hiburan, Direktori, dan Surat Pembaca. Di bawah menu (fitur) terdapat tiga kolom, kolom ke-1 berisi mesin pencari dan kategori, kolom ke-2 berisi ucapan selamat datang di Portal

Depok, atau pun informasi yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kepentingan Pemkot Depok; kemudian yang terakhir kolom ke-3 berisi Agenda Pemkot Depok, Perda, Layanan dan Perijinan.

Bila kita buka (klik) satu per satu menu Pemkot Depok, misalnya menu Pemerintah dan Kota, Sektor Penting, Wisata dan Hiburan, kita akan disuguhkan tulisan yang hampir tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang ada perubahan yang sangat diperlukan. Contohnya tentang visi dan misi Pemkot Depok (Gambar a.2)

Gambar a.2

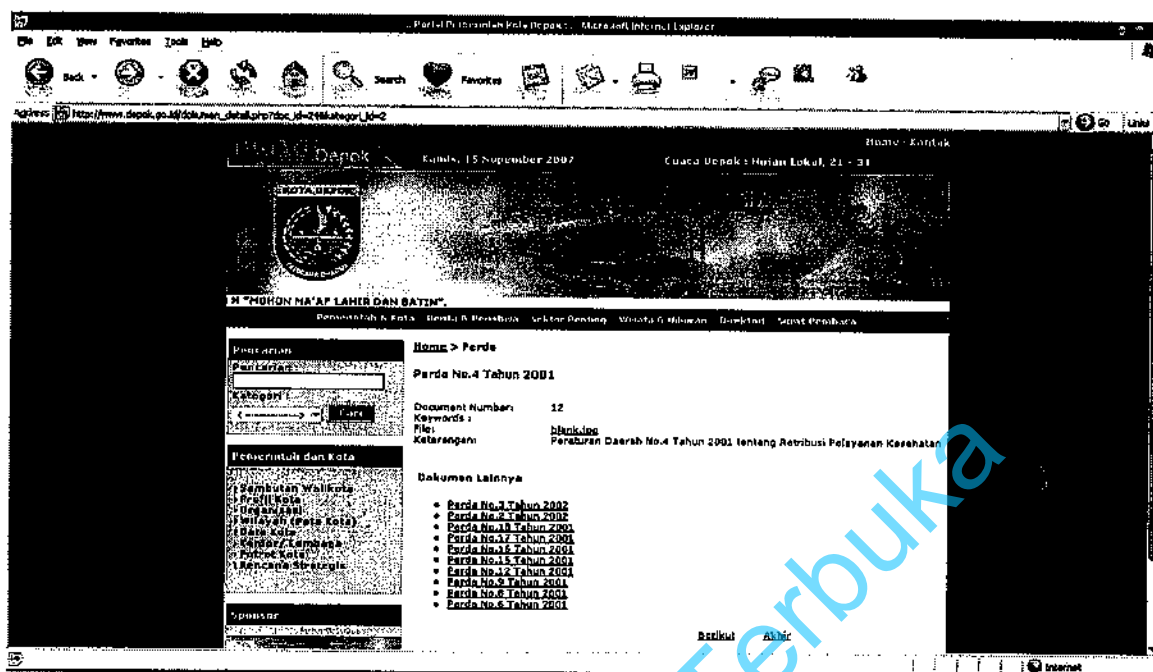


Kondisi per 15 November 2007

Kemudian bila kita buka menu Peraturan Daerah kita akan melihat bacaan yang informatif yang seharusnya menjadi layanan bagi publik, yaitu tentang peraturan layanan KTP. Misalnya dalam peraturan pembuatan KTP ini, biaya dan aturan dicantumkan. Kemudian tentang pembuatan Akte Catatan Sipil. Dalam peraturan Akte Catatan Sipil, ternyata biaya tidak dicantumkan tetapi peraturan/alur pembuatannya ada. Demikian pula pada peraturan tentang Akte Kelahiran, biaya tidak dicantumkan tetapi alur pembuatan ada.

Jadi, dari beberapa Perda ini, tidak semuanya menyajikan informasi kepada publik secara transparan (Gambar a.3)

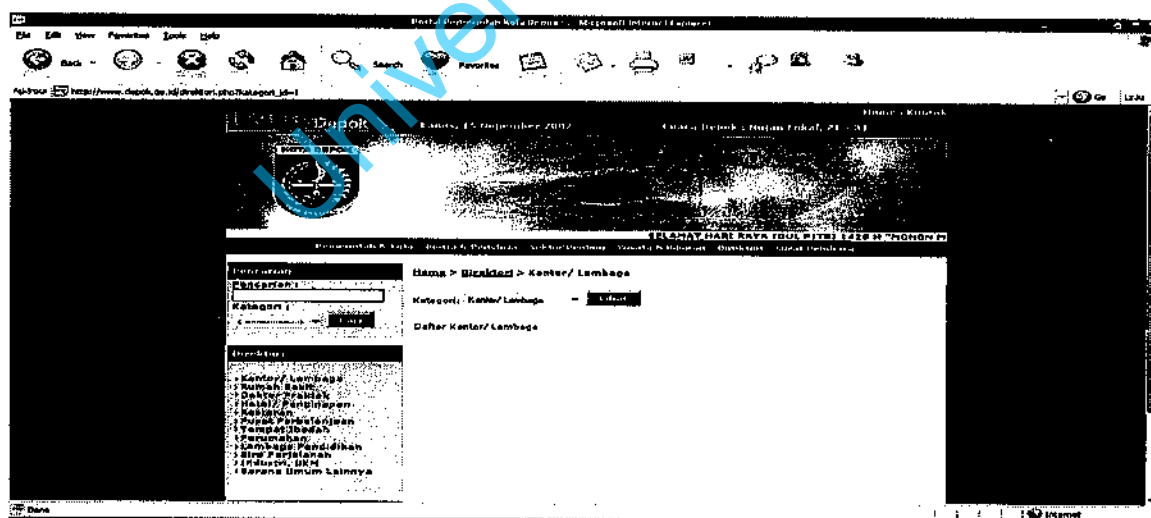
Gambar a.3



Kondisi per 15 November 2007

Setelah kita buka menu Perda, kita coba buka menu direktori. Dalam menu direktori kita akan menjumpai sajian yang kosong (Gambar a.4)

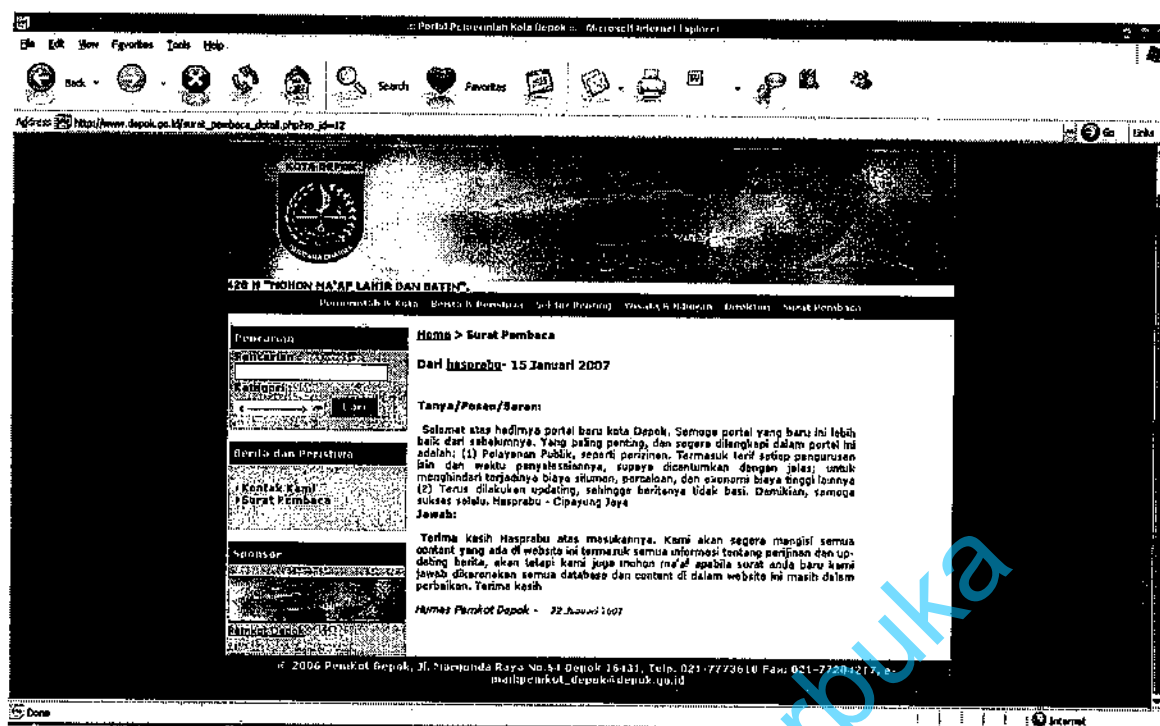
Gambar a.4



Kondisi per 15 November 2007

Kemudian coba kita lihat menu Surat Pembaca, di mana dalam menu Surat Pembaca ini diharapkan akan terlihat tampilan proses komunikasi antara masyarakat dengan Pemkot Depok yang atraktif. Tapi pada kenyataannya, menu ini sangat sepi. Coba lihat menu ini yang dibuka (diklik) pada tanggal 15 November 2007. Ternyata tanya jawab yang tertampil dari tanggal 15 Januari 2007, kondisinya tidak berubah sama sekali. Tidak ada penambahan komunikasi. Coba kita analisa apa yang ditanyakan oleh penanya yaitu Hasprabu. Hasprabu menyatakan/menyarankan "Selamat atas hadirnya portal baru kota Depok. Semoga portal yang baru ini lebih baik dari sebelumnya. Yang paling penting, dan segera dilengkapi dalam portal ini adalah: (1) pelayanan publik, seperti perizinan. Termasuk tarif setiap pengurusan izin dan waktu penyelesaiannya, supaya dicantumkan dengan jelas untuk menghindari biaya siluman, percaloan dan ekonomi biaya tinggi lainnya. (2) Terus dilakukan updating, sehingga beritanya tidak basi. Demikian, semoga selalu sukses. Hasprabu – Cipayung Jaya". Kemudian apa tanggapan Pemkot Depok? Jawabannya adalah "Terima kasih Hasprabu atas masukannya. Kami akan segera mengisi semua content yang ada di *web site* ini termasuk semua informasi tentang perijinan dan *up dating* berita, akan tetapi kami juga mohon maaf apabila surat Anda baru kami jawab dikarenakan semua database dan content di dalam *web site* ini masih dalam perbaikan. Terima kasih". Pertanyaan Hasprabu dilontarkan tertanggal 15 Januari 2007 dan dijawab tertanggal 22 Januari 2007. Namun yang menjadi keprihatinan adalah, apa yang diminta oleh masyarakat (Hasprabu) tentang transparansi layanan publik, sampai saat menu ini dibuka (15 November 2007), tidak ada kemajuan yang berarti. *Up dating* tidak jalan, demikian pula transparansi terhadap layanan publik hanya setengah-setengah. Artinya Pemkot Depok hanya merespon jawaban saja, tetapi implementasinya belum ada (lihat Gambar a.5).

Gambar a.5



Kondisi per 15 November 2007

b. Kebijakan Pengembangan *E_govt* Pemkot Depok

Kebijakan pengembangan *Web site* Depok mengacu pada Inpres No.3 Tahun 2003, Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Surat Keputusan Walikota Depok No. 53 Tahun 2004.

Pembuatan *E_govt* Pemkot Depok dilakukan melalui studi banding dan mengacu pada ketentuan yang telah ditentukan. Sebagaimana dinyatakan Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika, “prosesnya melalui studi banding, karena ada Perda tentang SPOK. Setelah studi banding, kemudian membuat tupoksi apa saja yang dibidangi untuk telematika secara spesifik dan detail, kemudian dituangkan dalam keputusan kota. Studi banding dalam rangka pembuatan *E_govt* dilakukan dengan berkunjung kota Sragen. Di Sragen pelayanan *e_govt* sudah meliputi pelayanan satu pintu, kelihatan Pak Wali tertarik ingin mengarah ke sana”.

Persiapan Pemkot Depok dalam pembuatan *E_govt* selain dengan studi banding, juga dilakukan pengkajian dengan mengambil konsultan dari Universitas Indonesia. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika, “pengkajian

dilakukan dengan menggunakan konsultan dari luar, Pusilkom UI, Pak Noli. Sekarang, *e_govt* masih dalam proses analisis. Biaya tidak sedikit, karena harus memakai tenaga ahli. Kalau semua sudah OK. Mudah-mudahan 2008 sudah running”.

Berikut ini adalah acuan Pemkot Depok dalam membuat *E_government*. Dalam Perda No. 16 Tahun 2003 disebutkan:

Paragraf 1 Kedudukan,

Pasal 71

Perpustakaan dan Telematika merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas,

Pasal 72

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang arsip, perpustakaan dan telematika.

Paragraf 3 Fungsi,

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (72) Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan, perpustakaan dan telematika
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika terdiri dari: Kepala Kantor, yang membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengelolaan Arsip Daerah
- c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan

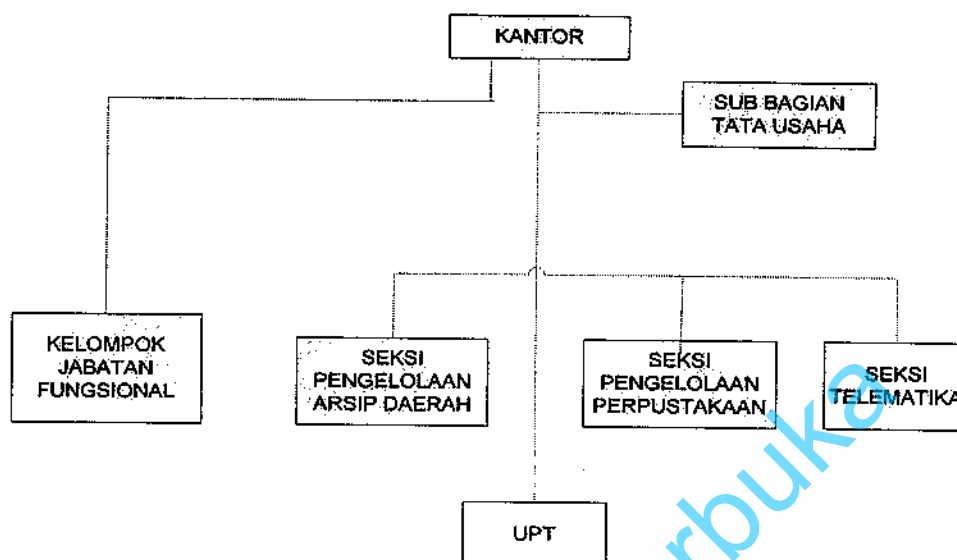
- d. Seksi Telematika
- e. Unit Pelaksana Teknis Kantor
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengembangan *E_govt* Pemkot Depok berada di bawah Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika yang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasinya didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Depok No. 53 Tahun 2004. Khusus untuk pengembangan ICT (E-Govt) ini berada dalam lingkup Seksi Telematika dengan tugas sebagaimana disebutkan pada Bagian Kelima pasal 7 yaitu:

- (1) Seksi Telematika mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kegiatan pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan telematika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Telematika mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan mengacu pada program kerja kantor.
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan telematika.
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi/telematika berhubungan dengan piranti keras, piranti lunak
 - d. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan teknologi informasi, sistem jaringan dan *e_government*.
 - e. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang sistem informasi.
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Telematika
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Organisasi dan Tata Kerja Unit mengacu pada Surat Keputusan Walikota Depok No. 53 Tahun 2004.

Organisasi dan Tata Kerja Unit (SK Walikota Depok No.53/2004)



Secara struktural, Seksi Telematika dikepalai oleh Kepala Kantor, yang tidak hanya membawahi Seksi Telematika, tetapi juga Seksi Pengelolaan Arsip Daerah dan Seksi Pengelolaan Perpustakaan.

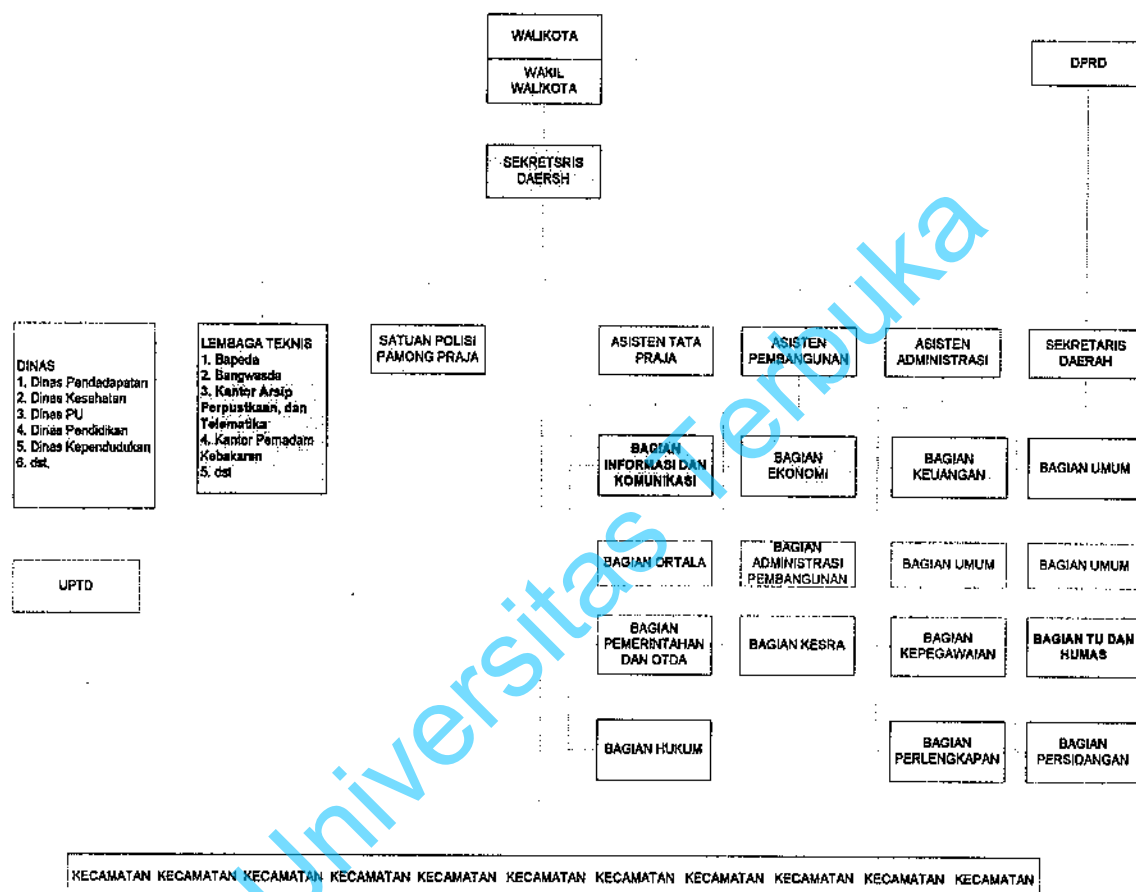
- e. Prosedur Pengisian Tampilan *Web site*

Seksi Telematika bertugas menyediakan 'rumah (*web site*)'. Dalam rumah tersebut tersedia 'ruangan' untuk penayangan informasi. Isi informasi didapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penentuan kebijakan tentang laik tidaknya informasi yang akan disajikan, pertama-tama terletak pada SKPD, kemudian disaring pada unit Informasi dan Komunikasi (Infokom). Setelah SKPD memasukan informasi 'siap saji' kepada bagian Infokom, Infokom akan menampilkan (on line) pada *Web site*.

Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika menegaskan, "di Infokom ada tim yang bertanggung jawab apakah layak tidaknya suatu informasi ditampilkan. Kalau kita hanya teknisnya saja, yang menampilkan bukan kita, dia (Infokom) mempunyai tugas menampilkan, siapa yang bertanggung jawab untuk menjawab (bila ada pertanyaan) sudah ada (SKPD).

Bila melihat bagan Organisasi dan Tata Kerja Unit, di situ tidak terlihat keterkaitan antara Seksi Telematika dengan SKPD, dan Infokom. Hal ini dikarenakan, memang antara Seksi Telematika yang berada pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika berdiri terpisah dengan Infokom. Seksi Telematika berada di bawah Lembaga Teknis, sedangkan Bagian Informasi dan Komunikasi (Infokom) berada di bawah Asisten Tata Praja.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Perda No. 16/2003)



Keterpisahan antara Seksi Telematika dengan Bagian Infokom di sisi lain yang sebenarnya saling berkaitan erat dalam pekerjaan sering menimbulkan masalah, yaitu tumpang tindih tugas. Dalam hal ini Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika mengemukakan "Perlu ada pembenahan, Bagian Infokom di satu sisi ada di bawah Asisten Tata Praja, di sisi lain ada kita (Arsip, Perpustakaan dan Telematika). Kalau perlu telematika harusnya bergabung dengan Infokom agar tidak *overlap*. Saya mengharapkan untuk ke

depan apakah perlu infokom dilikuidasi bergabung dengan telematika? Karena ada hal yang sifatnya satu kebijakan atau satu kewenangan, apakah ini kewenangan infokom atau telematika. Karena misalnya ada undangan pertemuan yang berkaitan dengan telematika dari Depkominfo, diatuhkan ke kita. Namun karena di sisi lain ada keterkaitan dengan Infokom, maka Infokom diundang". Sekarang saya sedang menyusun Perda kearsipan, perpustakaan, dan telematika terpisah. Untuk persiapan (Telematika) berdiri sendiri".

B. Gambaran Umum Keadaan Responden

Untuk mendukung analisis data yang dilakukan terhadap responden, perlu diketahui terlebih dahulu kondisi secara umum keadaan responden yang dijadikan sebagai obyek penelitian ini. Responden yang mengoperasikan *e_government* yang berada di Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika, berjumlah 9 orang. Ke sembilan orang ini dijadikan sebagai sample sekaligus populasi dalam penelitian ini. Dari seluruh responden yang diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi 28 pertanyaan, seluruhnya mengembalikan kuesioner.

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yang menyangkut keadaan responden pegawai yang mengoperasikan *e_government* pada Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja golongan pegawai.

a. Umur Responden

Pengelompokkan pegawai pada Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika, berdasarkan umur pegawai antara lain dimaksudkan untuk melihat apakah jenis pekerjaan membutuhkan kategori umur tertentu atau tidak atau sejauh mana kegiatan pengelolaan *e_government* memerlukan pegawai dengan kategori umur tertentu.

Table 4.1. Umur Pegawai

Umur Pegawai	Frekuensi	Persentase (%)
21 - 30 Tahun	3	33.3
31 - 40 Tahun	5	55.6
41 - 50 Tahun	1	11.1
Total	9	100.0

Komposisi pegawai dilihat dari sisi umur pegawai menunjukkan bahwa hampir setengahnya (55.6%) berusia antara 31-40 tahun. Dengan demikian nampaknya jenis pekerjaan di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika sudah memiliki pegawai dengan komposisi umur pegawai yang memadai.

b. Jenis Kelamin Responden

Pengelompokkan pegawai pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis kelamin apa yang sebenarnya dibutuhkan pada Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika. Apakah Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika lebih cenderung memanfaatkan pegawai dengan jenis kelamin tertentu atau tidak.

Table 4.2. Jenis Kelamin Pegawai

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	4	44.4
Perempuan	5	55.6
Total	9	100.0

Dari Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa penyebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah merata dimana pegawai laki-laki berjumlah 4 orang (44.4%) dan pegawai perempuan berjumlah 5 orang (55.6%). Nampaknya jenis pekerjaan pada unit Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika tidak memerlukan jenis kelamin tertentu untuk mengoperasikan komputer atau mengelola kegiatan *e_government*.

c. Tingkat Pendidikan Responden

Pengelompokkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan diharapkan dapat mengetahui kebutuhan tenaga untuk mengerjakan kegiatan pengoperasian komputer atau *e_government* yang ditujukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Table 4.3. Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	4	44.4
D3	1	11.1
S1	3	33.3
S2	1	11.1
Total	9	100.0

Dari table 4.3 di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh pegawai yang diteliti maka pendidikan yang tertinggi adalah tingkat master (S2), sedangkan S1 berjumlah 1 orang dan yang lainnya berkisar antara tingkat SMA dan D3. Sekitar 4 pegawai (hampir setengahnya) adalah berpendidikan SMA, mungkin karena jenis pekerjaan dan pengelolaan unit ini lebih bersifat teknis, sehingga pendidikan para operatornya adalah bukan setingkat sarjana.

d. Masa Kerja Responden

Masa kerja sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan, dapat mempengaruhi kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin lama masa kerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan tertentu memungkinkan pegawai yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang belum mempunyai masa kerja yang lama. Sejauh mana komposisi masa kerja pegawai Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika di Pemerintah Kota Depok dapat dilihat pada table berikut ini.

Table 4.4. Masa Kerja Pegawai

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1 - 3 Tahun	4	44.4
4 - 7 Tahun	1	11.1
8 - 11 Tahun	1	11.1
12 - 15 Tahun	2	22.2
16 - 20 Tahun	1	11.1
Total	9	100.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari seluruh jumlah pegawai yang ada di Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Telematika tersebut setiap tahunnya hanya merekrut sedikit pegawai baru. Selain itu hanya pada masa belakangan saja, dalam arti dihitung mulai dari tahun awal diangkat menjadi pegawai baru, maka pegawai yang memiliki masa kerja relatif yang tidak lama (1- 3 tahun) relatif cukup banyak (4 orang = 44.4%) dibandingkan masa kerja yang lainnya yang rata-rata hanya 1 orang.

C. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian maka dilakukan pendeskripsian data yang dilakukan dengan menganalisis data setiap variable yang digunakan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan situasi dan kondisi setiap variable yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan terhadap informasi yang diperoleh dilakukan dengan cara menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau skor yang telah diolah dan selanjutnya dijelaskan secara deskriptif.

Catatan:

Tabel distribusi frekuensi ditentukan dengan mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut: (Sudrajat, 1997:20; Umar, 1998:225)

- 1) Penentuan banyak kelas (k)
- 2) Menentukan range (r) atau kisaran, rumus:

$$r = X_{\max} - X_{\min}$$

Keterangan:

- X_{\max} (skor maksimal) = jumlah responden x skor maksimal x jumlah item soal
- X_{\min} (skor minimal) = jumlah responden x skor minimal x jumlah item soal

- 3) Menentukan lebar kelas (L), rumus:

$$L = \frac{r}{3}$$

4) Menentukan batas kelas (*class mark*), yaitu:

$$X_{1b} \text{ (batas bawah kelas pertama)} = X_{\min}$$

$$X_{1a} \text{ (batas atas kelas pertama)} = X_{\min} + L, \text{ dan seterusnya.}$$

Penyusunan table distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui frekuensi responden yang masuk dalam setiap kelas.

Skor yang tertinggi untuk setiap variable digunakan untuk menyimpulkan sejauh mana kajian implementasi *E_government*, apakah termasuk kurang memuaskan, cukup memuaskan atau memuaskan.

D. Penjelasan masing-masing data per variable penelitian

a. Dukungan Pimpinan

Yang dimaksud dukungan pimpinan dalam penelitian ini adalah segala aktivitas pimpinan dalam rangka mensukseskan implementasi *E_government* sehingga sesuai dengan visi dan misi organisasi pemkot Depok. Variabel dukungan pimpinan terdiri atas indikator motivasi, kinerja staf, serta pengawasan yang dioperasionalkan kepada 5 item pertanyaan. Terdapat tiga alternatif jawaban di mana masing-masing jawaban diberi skor 1, 2, dan 3 (rendah, sedang, tinggi)

Tabel 4.5 menggambarkan tentang dukungan yang diberikan oleh pimpinan kepada para staf dalam penerapan *E_government*, dimana table tersebut menunjukkan bahwa proporsi tertinggi jawaban responden terdapat pada alternatif jawaban ke-3 sebanyak 31 (68.9%), kemudian diikuti alternatif jawaban ke-2 sebanyak 11 (24.5%), dan alternatif jawaban ke-1 sebanyak 3 (6.6%). Data pada table ini menunjukkan bahwa dalam menerapkan *E_government*, para pegawai memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Pimpinan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika, bahwa Walikota Depok menyatakan "Sebagai aparat dengan kewajiban memberikan pelayanan, kami membutuhkan peralatan ICT. Pak Wali itu kan dari BPPT, ia ingin membesarkan IT yang ada di Depok sini. Bu Irna, pokoknya harus mampu membuat IT menjadi besar".

Dukungan pimpinan tersebut terutama menyangkut pemberian motivasi kerja, membantu bawahan apabila mendapat masalah, mendukung program pelatihan maupun peningkatan kinerja pegawai, atau mengawasi pekerjaan yang dilakukan pegawainya.

Tabel 4.5 Dukungan Pimpinan

No. Pertanyaan	Frekuensi (%)	Alternatif Jawaban Responden			Tidak Menjawab	Jumlah Skor
		1	2	3		
1	F	1	2	6	0	9
	%	11.1	22.2	66.7	0.0	100
2	F	0	4	5	0	9
	%	0.0	44.4	55.6	0.0	100
3	F	1	1	7	0	9
	%	11.1	11.1	77.8	0.0	100
4	F	1	3	5	0	9
	%	11.1	33.3	55.6	0.0	100
5	F	0	1	8	0	9
	%	0.0	11.1	88.9	0.0	100
Jumlah (5x9=45)		3	11	31		
Persentase (%)		6.6	24.5	68.9		

Dukungan pimpinan pada dasarnya merupakan salah satu tugas yang sangat penting dari seorang pimpinan kepada bawahannya sebagai bentuk tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi tidak mungkin dapat dicapai pimpinan sendirian, bagaimanapun pandai dan ahlinya seorang pemimpin. Agar tujuan organisasi dapat tercapai, perlu ada kerjasama antara pimpinan dan bawahan di mana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab.

b. Kompetensi Operator

Yang dimaksud kompetensi operator dalam penelitian ini adalah adalah kemampuan staf dalam menjalankan program *E_government*. Variabel kompetensi operator terdiri atas indikator keahlian IT, efektivitas kerja serta pelayanan kepada masyarakat yang

dioperasionalkan kepada 3 item pertanyaan. Terdapat dua alternatif jawaban dimana masing-masing jawaban diberi skor 1 dan 2 (rendah dan tinggi)

Tabel 4.6 menggambarkan tentang kompetensi operator dalam menjalankan program *E_government*, dimana table tersebut menunjukkan bahwa proporsi tertinggi jawaban responden terdapat pada alternatif jawaban ke-2 yaitu sebanyak 15 (55.6%), dan diikuti alternatif jawaban ke-1 sebanyak 12 (45.4%). Data pada table ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan program *E_government*, kompetensi operator pada umumnya mempunyai kualitas rata-rata atau para pegawai belum memiliki kualitas yang memadai untuk menjalankan program *E_government*. Hal tersebut dapat terlihat pada table di bawah dimana hampir semua pegawai tidak memiliki latar belakang keahlian yang cukup di bidang teknologi informasi (IT), padahal latar belakang pengetahuan dan ketrampilan pegawai di bidang IT sangat diperlukan agar terdapat kesesuaian antara latar belakang pendidikan atau keahlian yang dimiliki pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan (*the right man on the right job*).

Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika sendiri mengakui bahwa keberhasilan *E_govt* akan tergantung pada SDM yang menjalankan. Latar belakang yang dimiliki Pimpinan pun belum mencerminkan kompetensi IT. Sebagaimana pengakuannya "latar belakang saya bukan IT, tetapi Sarjana Hukum, S2 saya administrasi negara. Staf khusus Telematika kami 3 orang. Jadi sebetulnya Telematika ini lembaga yang masih sangat muda. SDM sangat sedikit. Tetapi tidak berarti dengan tenaga ini kita tidak jalan. Teknisi dirangkap oleh operator yang sarjana komputer. Semestinya kebutuhan pegawai tidak segitu. Harusnya banyak ya, nanti dari kepegawaian akan mendrop orang dari latar belakang IT. Tambahannya 5. Yang sudah ada 16 (keseluruhan staf kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika); perlu tambahan lagi 10 jadi 26. Yang menangani operator ada 3 ditambah 1 jadi 4, kemudian ada pindahan dari BPPT, mendapat tambahan 5 *dropin* dari Kepegawaian".

Tabel 4.6 Kompetensi Operator

Pertanyaan	Frekuensi (%)	Alternatif Jawaban Responden		Tidak Menjawab	Jumlah Skor
		1	2		
1	F	8	1	0	9
	%	88.9	11.1	0.0	100
2	F	3	6	0	9
	%	33.3	66.7	0.0	100
3	F	1	8	0	9
	%	1.1	88.9	0.0	100
Jumlah=27		12	15		
Persentase		45.4	55.6		

Dari data tersebut di atas maka peran organisasi dan pimpinan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para pegawainya di bidang teknologi informasi. *E_government* merupakan bidang pekerjaan yang berhubungan dengan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan aspek teknologi informasi, dan teknologi informasi selalu terus berubah dan berkembang dengan cepat. Apabila pegawai kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi ini maka akan menyulitkan pegawai dan juga akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan tolok ukur keberhasilan *e_govt* menurut Albarda (2004), yaitu aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan SDM dari organisasi dalam mengoperasikan dan memelihara sistem agar dapat berfungsi optimal dan berkesinambungan. Kemampuan dan keandalan sistem yang tinggi dalam jangka panjang menjadi kurang berpengaruh apabila kemampuan SDM dalam organisasi tidak ditingkatkan.

c. Pendanaan

Yang dimaksud pendanaan dalam penelitian ini adalah kebutuhan finansial bagi terselenggaranya E-Government. Variabel pendanaan terdiri atas dukungan dana serta

insentif bagi staf yang dioperasionalkan kepada 2 item pertanyaan. Terdapat dua alternatif jawaban dimana masing-masing jawaban diberi skor 1 dan 2 (rendah dan tinggi).

Tabel 4.7 menggambarkan tentang pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program *E_government*, dimana table tersebut menunjukkan bahwa proporsi tertinggi jawaban responden terdapat pada alternatif jawaban ke-2 yaitu sebanyak 13 (72.2%), dan diikuti alternatif jawaban ke-1 sebanyak 5 (27.8%). Data pada table ini menunjukkan bahwa dalam mengoperasikan program *E_government*, dana secara umum tidak menjadi masalah. Walaupun ada sebagian yang menjawab bahwa dukungan dana dalam penyelenggaraan *E_government* tersebut belum memadai. Namun Pimpinan menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan *e_govt* "Anggaran sekarang ada, yaitu betul-betul untuk membesarkan telematika. Dari APBD kota".

Tabel 4.7 Pendanaan

Pertanyaan	Frekuensi (%)	Alternatif Jawaban Responden		Tidak Menjawab	Jumlah Skor
		1	2		
				0	9
1	F	2	7	0.0	100
	%	22.2	77.8	0	9
2	F	3	6	0.0	100
	%	33.3	66.7	0	9
Jumlah=18		5	13		
Persentase		27.8	72.2		

Pada umumnya setiap unit organisasi membutuhkan dana dalam rangka mendukung setiap kegiatan yang sudah menjadi programnya. Dana tersebut dapat digunakan untuk memelihara program *E_government*, mengembangkan program, atau memberikan insentif kepada para pegawainya. Table di atas menunjukkan bahwa dana dianggap sudah memadai. Mungkin apabila kebutuhan unit sudah meningkat dan jumlah pegawai sudah banyak, kemungkinan dana menjadi masalah yang pokok yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

d. Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah kebutuhan hardware maupun software dalam rangka pengelolaan E-Government. Variabel sarana dan prasarana terdiri atas kebutuhan komputer, kebutuhan printer, kemampuan program, serta kebutuhan server yang dioperasikan kepada 4 item pertanyaan. Terdapat dua alternatif jawaban dimana masing-masing jawaban diberi skor 1 dan 2 (rendah dan tinggi).

Tabel 4.8 menggambarkan tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan program *E_government*, dimana table tersebut menunjukkan bahwa proporsi tertinggi jawaban responden terdapat pada alternatif jawaban ke-1 yaitu sebanyak 23 (63.9%) dan diikuti alternatif jawaban ke-2 sebanyak 4 (11.1%). Data ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan program *E_government*, sarana dan prasarana kurang memadai. Padahal salah satu tolok ukur dari keberhasilan implementasi *e_govt* terletak pada ketersediaan perangkat (Albarda, 2004). Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat pengoperasian *E_government* yang nantinya berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada umumnya sarana dan prasarana yang kurang memadai menyangkut peralatan komputer dan printer, serta server yang dianggap masih belum mencukupi. Komputer yang ada di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika sebanyak 3. Hardisk server 40 Giga. Pada umumnya responden juga menganggap kecepatan pemrosesan data belum memuaskan sehingga dapat menghambat tugas pekerjaannya.

Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana

Pertanyaan	Frekuensi (%)	Alternatif Jawaban Responden		Tidak Menjawab	Jumlah Skor
		1	2		
1	F	7	0	2	9
	%	77.8	0.0	22.2	100
2	F	6	1	2	9
	%	66.7	11.1	22.2	100
3	F	6	0	3	9
	%	66.7	0.0	33.3	100

4	F	4	3	2	9
	%	44.5	33.3	22.2	100
Jumlah=36		23	4	9	
Persentase		63.9	11.1	25.0	

Jika memperhatikan antara Tabel 4.4 tentang Pendanaan dan Tabel 4.5 tentang Sarana dan Prasarana, nampaknya bertolak belakang. Disatu pihak dana pengoperasian *E_government* tidak menghadapi masalah, tapi di lain pihak sarana dan prasarana untuk menjalankan *E_government* masih belum memadai. Terdapat kemungkinan bahwa dana yang disediakan untuk mengoperasikan *E_government* serta insentif bagi pegawai memang dianggap memadai. Namun ketika dihadapkan dengan kenyataan kebutuhan peningkatan kemampuan *E_government*, ternyata memang sarana dan prasarana masih dianggap belum memadai. Pimpinan dan organisasi harus memperhatikan permasalahan ini dan harus berusaha meningkatkan kinerja program *E_government* sehingga program ini benar-benar diharapkan mempunyai kinerja yang memadai dan memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

e. Kondisi Ruangan

Yang dimaksud kondisi ruangan dalam penelitian ini adalah tempat kegiatan pengelolaan *E_government*. Variabel kondisi ruangan terdiri atas kenyamanan staf dalam bekerja serta prosedur pekerjaan dalam mengelola *E_government* yang dioperasikan kepada 8 item pertanyaan. Terdapat dua alternatif jawaban dimana masing-masing jawaban diberi skor 1 dan 2 (rendah dan tinggi).

Tabel 4.9 menggambarkan tentang ruangan pengoperasian *E_government*, dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa proporsi tertinggi jawaban responden terdapat pada alternatif jawaban ke 2 yaitu sebanyak 42 (58.4%), dan diikuti alternatif jawaban ke-1 sebanyak 26 (36.1%). Data ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan program *E_government*, ruangan yang digunakan dalam mengoperasikan E.Government sudah cukup memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penggunaan pendingin (AC) di dalam ruangan, walaupun jumlahnya mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu penerangan di dalam ruangan juga tidak mengecewakan para operator atau pegawainya. Secara umum tataruang yang digunakan dalam hubungannya dengan pengelolaan program *E_government* tidak terlalu mengecewakan. Hanya mungkin yang menjadi catatan adalah perlunya prosedur atau aturan tentang keluar masuknya pegawai dalam ruangan.

Tabel 4.9 Kondisi Ruangan

Pertanyaan	Frekuensi (%)	Alternatif Jawaban Responden		Tidak Menjawab	Jumlah Skor
		1	2		
1	F	0	9	0	9
	%	0.0	100	0.0	100
2	F	6	2	1	9
	%	66.7	22.2	11.1	100
3	F	0	9	0	9
	%	0.0	100	0.0	100
4	F	3	3	3	9
	%	33.3	33.4	33.3	100
5	F	1	8	0	9
	%	11.1	88.9	0.0	100
6	F	8	1	0	9
	%	88.9	11.1	0.0	100
7	F	3	6	0	9
	%	33.3	66.7	0.0	100
8	F	5	4	0	9
	%	55.6	44.4	0.0	100
Jumlah=72		26	42	4	
Persentase		36.1	58.4	5.5	

Kondisi ruangan yang memadai untuk bekerja, sangat membantu sekali dalam mendukung penerapan *E_government*, karena operator atau pegawai yang menjalankan program *E_government* memerlukan ruangan yang nyaman untuk bekerja. Selain membutuhkan

sarana dan prasarana yang khusus dalam mengoperasikan *E_government*, juga dibutuhkan ruangan khusus yang membedakan dengan ruangan kerja lainnya.

f. Persepsi Pegawai terhadap Tampilan (*layout*)

Yang dimaksud tampilan (*layout*) dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara pelaksanaan program E-Government dengan pelayanan kepada masyarakat. Variabel tampilan terdiri atas indikator sasaran E-Government, komposisi visual, pengelolaan program E-Government, kebutuhan masyarakat yang dioperasionalkan kepada 6 item pertanyaan. Terdapat dua alternatif jawaban dimana masing-masing jawaban diberi skor 1 dan 2 (rendah dan tinggi).

Tabel 4.10 menggambarkan tentang tampilan (*lay out*) *E_government*, dimana table tersebut menunjukkan bahwa proporsi tertinggi jawaban responden terdapat pada alternatif jawaban ke-2 yaitu sebanyak 46 (85.2%), dan alternatif jawaban ke-1 sebanyak 6 (11.1%). Data pada table ini menunjukkan bahwa tampilan (*Layout*) sudah sangat memadai. Tampilan (*lay out*) tersebut memuat aspek-aspek seperti apakah tampilan tersebut komunikatif sehingga memudahkan pengelola dalam menggunakan *E_government* tersebut, di mana di dalamnya tercakup kebutuhan publik, kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Tampilan (*lay out*) sangat penting dalam pelaksanaan *E_government* karena jika tampilan tersebut tidak memudahkan dan malahan menyulitkan para penggunanya maka tujuan dilaksanakannya *E_government* tidak akan tercapai. Walaupun berdasarkan kuesioner yang diberikan persepsi staf terhadap tampilan sangat memadai, pimpinan memiliki pendapat berbeda. Pimpinan kantor Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika berpendapat “Dengan melihat perbandingan melalui seminar, studi banding, membaca, melihat tampilan *web site* lain, lokakarya, saya merasa *e_govt* depok tertinggal, orang lain sudah on line, master plan, software-hardware lengkap, kita baru dalam tahap kajian, tidak ada gregetnya. Mudah-mudahan dengan (bila) hasil kajian ok, saya berharap akan on line mencakup segala segi. Master plan ibarat wadah yang bisa mengakses ke mana-mana”. Sementara, Kepala Seksi Infokom menyatakan,” informasi lebih banyak diinput (dimasukan) ke media (Monitor Depok dan Warta Depok) dibanding ke dalam *web site*.

Web site hanya sebatas data, ya tergantung masukan dari SKPD. Hal ini senada dengan Pimpinan kantor Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika yang menyatakan,” yang utama ditampilkan adalah berita mutasi, dan berita-berita seremonial”.

Tabel 4.10 Tampilan (*Layout*)

Pertanyaan	Frekuensi (%)	Alternatif Jawaban Responden		Tidak Menjawab	Jumlah Skor
		1	2		
1	F	1	8	0	9
	%	11.1	88.9	0.0	100
2	F	1	8	0	9
	%	11.1	88.9	0.0	100
3	F	0	7	2	9
	%	0.0	77.8	22.2	100
4	F	0	9	0	9
	%	0.0	100	0.0	100
5	F	1	8	0	9
	%	11.1	88.9	0.0	100
6	F	3	6	0	9
	%	33.3	66.7	0.0	100
Jumlah=54		6	46	2	
Persentase		11.1	85.2	3.7	

Kebutuhan masyarakat selalu berubah dimana untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat menuntut semua pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, dalam hal ini terutama adalah pegawai unit *E_government* untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan menyenangkan. Tampilan atau layout *E_government* merupakan salah satu aspek penting bagi terselenggaranya *E_government* yang memuaskan masyarakat. Oleh karena itu pimpinan harus terus memperhatikan dan mengetahui apakah

aspek-aspek yang harus ada dalam rangka pengoperasian *E_government* sudah terpenuhi atau belum.

Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari perolehan data dan informasi yang telah dibahas pada BAB IV, untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana pelaksanaan *E_government* di Pemerintah Kota Depok, di buat suatu langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penghitungan Skor Tertinggi dan Terendah

VARIABEL	SKOR TERTINGGI	SKOR TERENDAH
A. DUKUNGAN PIMPINAN	9 or. X 3 x 5 item = 135	9 or. X 1 x 5 item = 45
B. KOMPETENSI OPERATOR	9 or x 2 x 3 item = 45	9 or x 1 x 3 item = 27
C. TAMPILAN/LAYOUT E.GOV	9 or x 2 x 6 item = 108	9 or x 1 x 6 item = 54
D. PENDANAAN	9 or x 2 x 2 item = 36	9 or x 1 x 2 item = 18
E. SARANA/PRASARANA	9 or x 2 x 4 item = 72	9 or x 1 x 4 item = 36
F. RUANGAN	9 or x 2 x 8 item = 144	9 or x 1 x 8 item = 72
TOTAL (A+B+C+D+E+F)	135+45+108+36+72+144 = 540	45+27+54+18+36+72 = 252

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa skor tertinggi adalah 540 dan terendah adalah 252.

2) Penghitungan Kategori:

a) $X_{mx} = 540$

$X_{min} = 252$

$r = 288$

b) $L = 288/3 = 93$

c) Kategori:

- Bawah (Kurang Memuaskan) = 252 - 345
- Menengah(Cukup Memuaskan) = 345,1 - 438
- Tinggi (Memuaskan) = 438,1 - 540

3) Penghitungan Skor Tertinggi untuk masing-masing variabel

VARABEL	SKOR TERTINGGI
A. DUKUNGAN PIMPINAN	$31 \times 3 = 93$
B. KOMPETENSI OPERATOR	$15 \times 2 = 30$
C. TAMPILAN/LAYOUT E.GOV	$46 \times 2 = 92$
D. PENDANAAN	$13 \times 2 = 26$
E. SARANA/PRASARANA	$4 \times 2 = 8$
F. RUANGAN	$42 \times 2 = 84$
TOTAL (A+B+C+D+E+F)	333

Penghitungan di atas menghasilkan skor tertinggi yang diperoleh dari data adalah sebesar 333.

Sesuai dengan batas kelas/kategori yang telah ditentukan maka total skor yang diperoleh yaitu 333, termasuk dalam kategori bawah (**Kurang Memuaskan**). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi *E_government* Pemerintah Kota Depok masih kurang memuaskan.

Belum baiknya implementasi *e_government* Pemkot Depok, juga dikarenakan:

1. Dari Perda No. 16 Tahun 2003 dan SK Walikota Depok No. 53 Tahun 2004, tidak ada yang menyinggung tentang bagaimana pemanfaatan *e_govt* untuk pelayanan publik secara eksplisit. *E_govt* Pemkot Depok lebih berfungsi sebagai sarana untuk membantu internal pemerintah Depok dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan. Hal ini dapat kita simak pada SK No.53 Tahun 2004 Bagian Kelima pasal 7, butir a, b, f, g. Sementara butir c, d, e, lebih kepada teknis pemeliharaan jaringan. Begitu pun pada

Perda No. 16 Tahun 2003, ternyata Perda ini melihat *E_govt* hanya untuk membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan fungsi sebagai perumus kebijakan teknis, penunjang penyelenggaraan pemerintah kota, dan pengelolaan urusan ketatausahaan. Dengan demikian, komitmen Pemkot Depok dalam menggunakan sarana *e_govt* untuk mengutamakan pelayanan publik belum terlihat pada peraturan-peraturan tersebut. *E_govt* harus sebatas sarana untuk menunjang tugas-tugas ketatausahaan Pemkot Depok. Padahal berdasarkan pendapat Conrad dalam Rahardjo (2001), *e_govt* merupakan istilah yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya memberikan sesuatu yang terbaik kepada pengguna jasa. Santoso (2005), menyatakan bahwa pengembangan *e_govt* diartikan sebagai upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Konsep efektif dan efisien ini senada dengan tujuan dikembangkannya *e_govt* sebagaimana pendapat Santoso (2005) yaitu pengembangan *e_govt* dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung *good governance*. Jadi, Perda Pemkot Depok No. 16 Tahun 2003 dan SK Walikota Depok No. 53 Tahun 2004 belum mencerminkan konsep *e_govt* yang sebenarnya atau sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003.

2. Dari sisi SDM, selain minimnya SDM yang handal di bidang IT, SDM yang berada di bawah SKPD sebagai titik awal sumber informasi untuk tampilan *Web site*, masih ada yang enggan membuka diri terhadap masyarakat luar, sebagaimana dinyatakan oleh Pimpinan Arsip, Perpustakaan dan Telematika, “misalnya dalam hal pengurusan perijinan mestinya kalo ingin menyampaikan agar masyarakat tahu, bisa saja. Tetapi tergantung pada SKPD. SKPD sekarang banyak belum siap, terkadang mereka (SKPD) ada ketertutupan, mereka melakukan tender tapi tidak berani menyebutkan angka tender? Justru dengan menyebutkan seperti itu kita tahu ada keberanian mereka ditanggapi apa tidak, juga Pak Wali bisa memantau, tetapi ya kita juga tidak tahulah kita ga bisa memaksakan, tetapi paling tidak kita sudah punya niat.

Berkaca dari pendapat Pimpinan tersebut, walaupun pengembangan *e_govt* mendapat dukungan dari Pimpinan, bila dukungan tersebut tidak diikuti dari SDM di bawahnya, maka sasaran *e_govt* sebagai sarana untuk mewujudkan *good governance* tidak tercapai.

3. Organisasi. Dari segi organisasi ternyata seksi yang khusus menangani *e_govt* Pemkot Depok berada di bawah Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika. Sementara keterkaitan kerja dalam hal menampilkan informasi untuk *Web site*, Seksi Telematika bergantung dengan SKPD dan Infokom. Sehingga pekerjaan Seksi Telematika tumpang tindih dengan Seksi Infokom. Tumpang tindih pekerjaan ini menjadikan ketidaknyamanan Pimpinan dalam hal mengambil suatu keputusan. “Saya juga suka mengadakan pertemuan, saran-saran mereka bagus, tetapi mengapa semua SKPD harus mengajukan kegiatan yang sama, kenapa tidak di Telematika, padahal induknya ada disini”. Kerisauan terhadap tumpang tindihnya unit yang menangani *e_govt* membuahakan keinginan dari Pimpinan untuk membentuk unit tersendiri, “telematika harus mampu berdiri sendiri”. Saya sedang menyusun tupoksi terpisah, ramping struktur kaya fungsi. Memperkecil struktur yang ada tapi semuanya mempunyai fungsi. Era sekarang lain, banyak muatan-muatan yang entah secara politis atau karena tuntutan, jadi sekarang kita mengikuti apa baiknya untuk era sekarang. Saya sebagai kepala kantor, mengantisipasi kenapa sih mesti harus disatukan, kalau disatukan kemudian terjadi pemisahan harus dibuat Perda lagi padahal biayanya ga sedikit. Udahlah berdiri sendiri saja. Saya melihat untuk kabupaten kota untuk nomenklatur kelembagaan kembali ke daerah kalo misalnya daerah mampu untuk membuat suatu lembaga, no way tidak ada masalah untuk membuat lembaga sendiri.

Pada akhirnya keberhasilan Pemkot Depok dalam penerapan *e_government* tergantung pada SDM, sarana dan prasarana, serta keinginan kuat dan konsistensi Pimpinan dalam menjalankan Inpres No. 3 Tahun 2003.

B. SARAN

1. Pemkot Depok mengevaluasi Perda No. 16 Tahun 2003 dan SK Walikota Depok No. 53 Tahun 2004, apakah pengembangan *e_govt* telah sesuai dengan tujuan Inpres No.3 Tahun 2003.
2. Pemkot Depok harus meningkatkan SDM di bidang TI, baik dari segi jumlah SDM maupun kualifikasinya.
3. Pemkot Depok harus mengubah kultur SDM, terutama pada SKPD-SKPD dan menyadarkan mereka bahwa *e_government* mengusung konsep *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada publik.
4. Apabila *e_government* akan dioptimalkan dalam memberikan pelayanan pada publik, struktur organisasi bidang yang menangani *e_government* sebaiknya tidak tumpang tindih dengan Seksi Infokom, dan bukan dijadikan satu dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan.
5. Sarana dan prasarana komputer ditingkatkan, baik software maupun hardware.
6. Tampilan *web site*, tidak hanya sebatas menampilkan berita, tetapi informasi yang menunjang pelayanan publik, seperti konsistensi antara biaya yang dipublikasikan dengan biaya yang sesungguhnya. Kemudian apabila masyarakat membutuhkan informasi layanan perijinan, statistik pengunjung, maupun penyaluran aspirasi terhadap Pemkot, diharapkan Pemkot dapat memfasilitasi dengan cermat, cepat, dan terbuka.

REKOMENDASI BAGI MATAKULIAH

Melalui hasil kajian tentang Implementasi *E_govt* pada Pemkot Depok, diketahui bahwa keterkaitan antara struktur, proses, dan teknologi ternyata tidak serta merta mengubah perilaku atau budaya suatu organisasi. Padahal keefektifan setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Dalam hal ini orang adalah sumber daya yang umum bagi semua organisasi.

Struktur organisasi merupakan pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan. Struktur ini sering digambarkan dengan suatu bagan organisasi. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi, para pimpinan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur organisasi. Sedangkan proses, suatu hal yang berkenaan dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi. Komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi prestasi kerja, sosialisasi, dan pengembangan karir adalah proses dalam setiap organisasi. Kadang-kadang pemahaman terhadap masalah proses seperti gangguan komunikasi, pengambilan keputusan atau sistem evaluasi prestasi kerja yang disusun secara kurang baik, dapat menghasilkan pengertian yang lebih tepat atas perilaku organisasi daripada hanya mengkaji tatanan struktural. Kemudian teknologi di sini diartikan sebagai sarana pendukung bagi organisasi dalam menjalankan aktivitas meraih tujuan secara efektif yang berupa penggunaan peralatan teknis dengan teknologi mutakhir. Contohnya maksimalisasi penggunaan komputer sebagai layanan (layanan publik berbasis web).

Berkaitan dengan implementasi *e_govt* pada Pemkot Depok, hubungan antara struktur, proses, dan teknologi tidak berjalan berkesinambungan. Struktur yang telah ada tidak mendukung terjadinya proses komunikasi organisasi, sekalipun telah didukung oleh teknologi. Struktur organisasi Pemkot Depok tidak dibuat dengan pemahaman yang jelas dari para pimpinannya, sehingga struktur tersebut tumpang tindih (Lihat bagan struktur). Kemudian kebijakan Pimpinan dalam pengembangan *e_govt* tidak mendapat dukungan penuh dari pimpinan-pimpinan di bawahnya akibat terjadi gap budaya antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan telah memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk menggunakan layanan berbasis web, tetapi bawahan masih berkuat dengan budaya organisasi yang lama, yang lamban dan tidak menghendaki transparansi. Apabila pimpinan ingin mengubah

perilaku organisasi agar sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka pimpinan harus mengelola organisasi dengan didasari keyakinan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam memimpin untuk setiap situasi, para pimpinan harus menemukan cara-cara yang berbeda yang cocok untuk situasi yang berbeda pula (Pendekatan Kontingensi).

Dengan demikian, rekomendasi bagi bahan ajar matakuliah Perilaku Organisasi, bahwa kajian ini dapat dijadikan sebagai contoh kasus untuk memahami keterkaitan antara struktur, proses dan teknologi sebagai konsep dari Perilaku Organisasi secara mendalam.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Albarda (2004). Strategi Implementasi TI untuk Tata Kelola Organisasi (IT Governance). Diakses dari dhi.rachdian.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,22/ - Hasil Tambahan – pada tanggal 27 Desember 2006
- Agung, I Gede (2003). Government: Strategi Meraba Gajah. Diakses dari adhi.rachdian.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,22/ - Hasil Tambahan – pada tanggal 27 Desember 2006
- Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E_government*.
- Irawan, Prasetya (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA LAN Press
- Javaladi, Sukanto (2004) *Evaluasi Pelaksanaan E_government di Depnakertrans*. Jakarta, Hariian Rakyat Merdeka
- LAN RI, 2004, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Buku III), Jakarta: LAN RI
- Marzuki, Didi (2006). Apa itu *E_government*. Diakses dari <http://www.egovindonesia.com> pada tanggal 27 Desember 2006.
- Nurcholis, Hanif (2005). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Modul Univeristas Terbuka. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Portal pemerintah daerah: <http://www/depok.go.id>
- Rahardjo, Budi, “*Membangun E-Government*”, Makalah Dipresentasikan pada Seminar Nasional Jaringan Komputer II Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar 19 Mei 2001.
- Santoso, Heru (2005). Implementasi *E_govt* Kabupaten Probolinggo. Diakses dari <http://www.egovindonesia.com> pada tanggal 27 November 2006.
- Satriya, Eddy (2005). Komputer, Divide dan Pembangunan Nasional. Diakses dari http://www.indonesian-embassy.or.jp/menui/information/opini/WSIS_final.pdf
- Soebagjo, dkk (2001). *Perilaku Organisasi*. Modul Universitas Terbuka. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Swastika, Ibnu (2003). Ada apa dengan E-Government. Diakses dari <http://www.denpasar.go.id> pada tanggal 16 November 2006

The World Bank Group, *E-Government Definition*,
<http://www.worldbank.org/publicsektor/egov/definition.htm>.

Lain-lain:

Majalah Layanan Publik Edisi XV/2006

Universitas Terbuka

Lampiran 1**HALAMAN IDENTITAS**

Judul Penelitian : Kajian terhadap Implementasi E_government pada Pemerintah Kota Depok

1. Ketua Peneliti

- Nama Lengkap : Meita Istianda, S.IP, M.Si
- Bidang Keahlian : Politik
- Jabatan/Pekerjaan : dosen Program Studi Administrasi Negara UT
- Unit Kerja : FISIP
- Telepon/HP : 7490941.1917/08569985807
- e_mail : meita@mail.ut.ac.id

2. Anggota Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Unit	Alokasi Waktu	
				Jam/Mg	Bulan
1.	Drs. Darmanto, M.Ed	Administrasi Negara	FISIP		10
2.	Dra. Murni Rachmatini, M.Si	Psikologi	FISIP		10



Lampiran 2
81539.PDF

PEMERINTAH KOTA DEPOK
KANTOR KESBANG DAN LINMAS KOTA DEPOK

Jln. Pemuda No. 70 B Pancoran Mas - Depok 16431

Telp./Fax. (021) 77204704

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1630 - Ksb./Kesbang & Linmas.

- Membaca : Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Jl. Cabe Raya, Ciputat Tangerang Nomor : 7897/J31.2/PG/2007, tanggal 16 Mei 2007 Perihal permohonan rekomendasi ijin Penelitian dalam rangka pengembangan Studi.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tanggal 19 Nopember 2003, Tentang Pembentukan & Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Surat Keputusan Walikota Depok Nmor 52 Tahun 2004, Tentang Rincian Organisasi Tata Kerja Kantor KESBANG & LINMAS Kota Depok.
- Mengingat : Kegiatan yang bersangkutan ,
Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukannya *Penelitian* oleh
- Nama : Terlampir
NIM/NPM : -
Program Studi : Administrasi Negara
Jurusan/Fak. : Ilmu Administrasi / FISIP UT
Judul Tesis/skripsi : " Kajian terhadap Implementasi E Government pada Pemerintah Kota Depok".
Lama : 3 (tiga) Bulan, Tanggal. 21-05-2007 s/d 21-08-2007
Tempat : Kantor Arsip dan Telematika Kota Depok

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/PKL/Magang yang bersangkutan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor/Bagian yang dituju, dengan menunjukan surat pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/topik masalah/tujuan akademik.
3. Apabila masa berlaku Surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan kegiatan dimaksud belum selesai, perpanjangan Izin kegiatan harus diajukan oleh Instansi Pemohon.
4. Sesudah selesai melakukan kegiatan, Yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Depok Up. Kepala Kantor KESBANG & LINMAS Kota Depok.
5. Surat ini akan dicabut & dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan ketentuan seperti tersebut diatas.

Depok, 21 Mei 2007

An. KEPALA KANTOR KESBANG & LINMAS
KASUBAG TU



SRI MULYATI, AH, BA
NIP. 010 080 965

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota (sebagai laporan) ;
2. Ka. Kantor Arsip & Telematika Kota Depok
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip.

Lampiran : Peserta Penelitian/Riset/PKL/Survey/Magang/Pengumpulan Data/Observasi dll.

No.	NAMA	NPM/NIM	JURUSAN/FAK.
1.	Meita Istianda, S.IP, M.Si	131652013	Ilmu Administrasi/FISIP UT
2.	Drs. Darmanto, M.Ed	131602651	Ilmu Administrasi/FISIP UT
3.	Dra. Murni Rachmatini, M.Si	100002415	Ilmu Administrasi/FISIP UT

Universitas Terbuka

**FORMAT OBSERVASI LOKASI
KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMKOT DEPOK**

A.	Identitas Unit	Keterangan
1.	Nama Unit	
2.	Pimpinan Unit	
3.	Jumlah Staf	
4.	Status Pegawai (PNS/bukan PNS)	
B.	Kondisi Unit Pengoperasian	
1.	Luas Ruangan	
2.	Jumlah Pendingin	
3.	Jumlah Komputer	
4.	Spesifikasi Komputer	
5.	Tata letak	
6.	Keteraturan	
7.	Sirkulasi	
C.	Alur Kerja	

Tanggal Observasi:

Peneliti:

1. Meita Istianda
2. Darmanto
3. Murni Rachmatini

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN		Keterangan/Catatan
Pimpinan Unit		
Data yang akan digali/informasi yang harus diperoleh		
1.	Apakah fasilitas e_govt diadakan sebagai respon terhadap adanya Inpres No. 3 Tahun 2003?	
2.	Sejak kapan e_govt diterapkan?	
3.	Untuk siapakah fasilitas e_govt ditujukan?	
4.	Apa yang diharapkan Pemkot Depok memberikan layanan melalui e_govt?	
5.	Apakah dengan adanya e_govt pelayanan kepada masyarakat meningkat?	
6.	Apakah jumlah masyarakat yang mengakses e_govt Pemkot Depok dapat terdeteksi? Bila ya, berapa rata-rata pada tiap harinya?	
7.	Bagaimana dengan biaya pengurusan perijinan setelah e-govt ada?	
8.	Apakah dengan adanya e_govt investasi daerah meningkat?	
9.	Apakah e_govt memacu masyarakat Depok untuk berwirausaha?	
10.	Kebijakan apa saja yang diutamakan tampil dalam tayangan e_govt? Apakah kebijakan yang sifatnya seremonial atau yang dibutuhkan masyarakat?	
11.	Berapakah jumlah pegawai yang mengelola e_govt?	
12.	Apakah pegawai pengelola e_govt terbagi dalam beberapa bidang misalnya ada bidang khusus pengelola aplikasi jaringan, pengelola sistem, teknisi hardware/software?	
13.	Apakah pegawai yang mengelola e_govt memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai? (IT, Pemrogram).	
14.	Melalui mekanisme bagaimana penerapannya? Alur kerjanya? (instruksi Walikota?)	
15.	Bagaimana sistem pengoperasiannya?	
16.	Berapa kapasitas bandwidthnya	
17.	Bagaimana perangkat kerasnya	
18.	Bagaimana perangkat lunaknya	
19.	Apa rencana pengembangan egov untuk masa yad?	
20.	Adakah permasalahan yang dihadapi dalam mengaplikasikan egov?	
21.	Bagaimana tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tsb?	

RESPONDEN		Keterangan/Catatan
Pimpinan Unit		
Data yang akan digali/informasi yang harus diperoleh		
1.	Dari mana user mengetahui Pemkot Depok telah memiliki layanan e_govt?	
2.	Apakah layanan e_govt Pemkot Depok sangat membantu pengguna dalam memperoleh informasi?	
3.	Apakah layanan e_govt Pemkot Depok sesuai dengan kebutuhan pengguna? Bila belum, apa saja yang seharusnya ada?	
4.	Apakah dengan adanya e_govt : a. biaya perijinan menjadi murah? b. proses perijinan menjadi cepat? c. pungutan liar hilang? d. pengurusan perijinan mudah? e. memberikan transparansi biaya perijinan?	
5.	Apakah akses ke tayangan e_govt mudah (cepat)?	
6.	Apakah tayangan e_govt Pemkot Depok komunikatif, dalam arti tersedia layanan untuk melakukan kontak?	
7.	Apakah apabila pengguna melakukan kontak melalui layanan tersebut cepat mendapatkan jawaban?	
8.	Apakah dari segi tampilan, tayangan e_govt memenuhi kriteria, enak dipandang, menarik, penggunaan warnanya sesuai?	
9.	Apakah informasi yang ditayangkan dalam e_govt tersebut <i>up to date</i> , artinya apa yang ditayangkan sesuai dengan kenyataan di lapangan? Misalnya bila ada tertayang biaya perijinan atau prosedur perijinan, maka ketika Anda langsung datang ke sana hal tersebut sesuai?	
10.	Info yang paling menarik dari tayangan e_govt apa?	

Tanggal Observasi:

Peneliti:

1. Meita Istianda
2. Darmanto
3. Murni Rachmatini

KUESIONER UNTUK OPERATOR

KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK

Sebagai Pemkot yang kami anggap berhasil dalam menerapkan *e-government* (*e-govt*), kami memilih Depok sebagai kajian kami. Dengan harapan apa yang diperoleh dari studi ini dapat dijadikan acuan oleh Pemkot lain di Indonesia.

Kuesioner ini ditujukan untuk melihat persepsi staf kantor Pemkot Depok terkait dengan implementasi *e-government* yang telah dijalankan. Untuk itu Anda diminta menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. Terima kasih atas kerjasamanya.

Identitas Responden:

1. Umur : _____
2. Jenis Kelamin : _____
3. Pendidikan : _____
4. Masa Kerja : _____

A. DUKUNGAN PIMPINAN

1. Apakah pimpinan memberikan motivasi kerja kepada staf?
 - A. sangat memotivasi
 - B. cukup memotivasi
 - C. kurang memotivasi
 - D. tidak memotivasi
2. Apakah pimpinan membantu staf bila ada masalah dalam mengaplikasikan *e-govt*?
 - A. selalu
 - B. kadang-kadang
 - C. tidak sama sekali
3. Apakah ada semacam sosialisasi (penjelasan) kepada staf sebelum program *e-govt* diterapkan?
 - A. Ada
 - B. Tidak ada
 - C. Tidak tahu
4. Apakah pimpinan berusaha meningkatkan keahlian staf dalam mengaplikasikan *e-govt* dengan cara misalnya *shortcourse*, magang, pelatihan, atau mengundang pakar Teknologi Informasi?
 - A. selalu
 - B. kadang-kadang
 - C. tidak sama sekali

5. Apakah pimpinan memonitor kerja staf?
 - A. selalu
 - B. kadang-kadang
 - C. sangat jarang
 - D. tidak pernah
6. Bagaimana cara pimpinan memonitor kerja staf?
 - A. meminta laporan data setiap hari
 - B. menugaskan staf khusus untuk memeriksa laporan data
 - C. terlibat langsung dalam proses pelaporan data
 - D. lainnya, sebutkan
7. Sepanjang pengetahuan Anda kebijakan penerapan *e_govt* itu bersifat?
 - A. top down (dari pimpinan ke bawahan)
 - B. bottom up (dari bawahan ke pimpinan)
 - C. tidak tahu

B. KOMPETENSI/KUALITAS OPERATOR

1. Apakah Anda memiliki latar belakang/keahlian di bidang Teknologi Informasi (TI)
 - A. Ya
 - B. Tidak
 Bila jawabannya ya, langsung ke pertanyaan No.3, bila tidak lanjutkan ke pertanyaan No.2 terlebih dahulu.
2. Bila tidak, apakah Anda mendapat pelatihan terlebih dahulu sebelum mengoperasikan komputer?
 - A. Ya
 - B. Tidak
3. Dari manakah Anda memperoleh keahlian di bidang TI?
 - A. melalui pendidikan khusus
 - B. pimpinan unit kerja
 - C. teman sejawat
 - D. lainnya, sebutkan (*shortcourse, training* dari "expert").....
4. Apakah Anda mendapat pendidikan TI secara berkelanjutan sampai dengan tingkat Ahli
 - A. Ya
 - B. Tidak
5. Apakah dengan TI meningkatkan efektifitas kerja Anda?
 - A. Ya
 - B. Tidak
6. Apakah dengan TI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat?
 - A. Ya
 - B. Tidak

C. TAMPILAN (*LAY OUT*),

1. Dari yang Anda ketahui untuk siapakah layanan *e_govt* ditujukan?
 - A. masyarakat luas
 - A. instansi Pemerintah
 - B. lembaga Swasta
 - C. karyawan *e_govt*
 - D. unit-unit internal Pemkot
 - E. lainnya(jawaban boleh lebih dari 1)
2. Menurut Anda *lay out* (komposisi huruf, warna, gambar, materi, sajian) *e_govt* Pemkot Depok sudah cukup komunikatif sebagai media penyampai pesan dan kebijakan Pemkot Depok
 - A. sangat komunikatif
 - B. komunikatif
 - C. tidak komunikatif
 - D. tidak tahu
3. Apakah pengembangan *lay out e_govt* mengacu pada ketentuan atau prosedur yang ditentukan oleh Pimpinan?
 - A. Ya
 - B. Tidak
4. Untuk pengembangan *lay out e_govt*, dilakukan kajian (penelitian/studi banding/meminta pendapat pakar) terlebih dulu tentang hal-hal yang diperlukan pengguna
 - A. Ya
 - B. Tidak
5. Apakah pembaharuan data (*updating data*) *e_govt* selalu dilakukan?
 - A. Ya
 - B. Tidak, alasan
6. Bila ya, *up dating* data dilakukan dalam waktu
 - A. 1 hari sekali
 - B. 2 hari sekali
 - C. 3 hari sekali
 - D. Sebutkan
7. Menurut Anda *e_govt* Pemkot Depok sudah menyajikan hal-hal yang dibutuhkan publik
 - A. Ya
 - B. Tidak
 - C. Tidak tahu
8. Apakah dengan adanya *e_govt* memudahkan Pemkot dalam melayani masyarakat
 - A. Tidak, alas an
 - B. Ya, dalam hal :
 - sosialisasi kebijakan kepada masyarakat,
 - kecepatan
 - ketepatan dalam menyediakan data
 - Lainnya sebutkan

D. DANA/INSENTIF

1. Bagaimana dukungan dana dalam penyelenggaraan egov
 - A. memadai
 - B. kurang memadai
 - C. tidak memadai
 - D. tidak ada
2. Apakah ada tunjangan khusus/insentif bagi staf
 - A. ada
 - B. tidak ada

E. SARANA DAN PRASARANA RUANG OPERATOR

1. Berapa jumlah komputer yang ada?
2. Berapa jumlah komputer yang dibutuhkan?
3. Berapa jumlah printer yang ada?
4. Berapa jumlah printer yang dibutuhkan?
3. Secara keseluruhan apakah kecepatan pemrosesan data sudah terpenuhi?
 - A. Ya
 - B. Tidak
4. Berapa kapasitas memori yang dimiliki?
5. Apakah memiliki server?
6. Berapa kapasitas server?
7. Berapa server yang dibutuhkan?

F. RUANGAN

1. Apakah ruangan untuk mengoperasikan komputer ber AC?
 - A. ya
 - B. tidak
 Jika tidak, langsung ke pertanyaan No.3
2. Jika ya, berapa jumlah AC yang ada?
3. Berapa sebenarnya jumlah AC yang dibutuhkan?
4. Berapa luas ruangan untuk mengoperasikan komputer?
5. Apakah penerangan di ruangan memadai?
 - A. ya
 - B. tidak

6. Apakah diterapkan ketentuan 'Dilarang makan dan minum di ruang komputer'?
 - A. Ya
 - B. Tidak (alasan)
7. Sebagai pusat layanan data dan informasi apakah ada penanggung jawab ruang komputer?
 - A. Ya
 - B. Tidak
8. Apakah staf yang keluar masuk ruang selalu dicatat/termonitor?
 - A. Ya
 - B. Tidak
9. Apakah untuk akses komputer semua staf TI diberi *password*?
 - A. Ya
 - B. Tidak
10. Apakah selalu dilakukan penggantian *password*?
 - A. Ya
 - B. Tidak
11. Kapan dilakukan penggantian *password*?
 - A. 1 minggu sekali
 - B. 1 bulan sekali
 - C.

Terima kasih, atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini.



WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

Nomor : 53 TAHUN 2004

Lampiran : -

Tentang

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI KANTOR ARSIP,
PERPUSTAKAAN DAN TELEMATIKA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d angka 3, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Perangkat Daerah, yaitu Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rincian Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 296);

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 296)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN TELEMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Kantor ...

4. Kantor adalah Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika Kota Depok.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika Kota Depok.
6. Arsip adalah Dokumen tertulis berasal dari komunikasi tertulis yang dikeluarkan instansi resmi, yang disimpan dan dipelihara khusus untuk referensi.
7. Perpustakaan adalah Kumpulan buku-buku bacaan, dan sebagainya.
8. Telematika adalah Kegiatan perumusan teknis kebijakan di bidang telekomunikasi, multimedia dan informatika meliputi teknis dari pengelolaan hard ware, soft ware dan brain ware (operator).
9. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah Pelaksanaan sebagian tugas kantor dilapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Kantor.

BAB II

UNSUR ORGANISASI

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan 73 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003, Unsur Organisasi Kantor terdiri atas :

a. Pimpinan ...

- a. Pimpinan, adalah Kepala Kantor;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis Operasional, adalah Kepala Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 3

- (1). Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan kantor serta penggunaan anggaran kantor.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis kantor dan rencana kerja tahunan mengacu pada rencana strategis kota;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pegawai;
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan bidang teknis meliputi pengelolaan arsip daerah, perpustakaan dan telematika;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Pelaksanaan ...

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga kantor, administrasi kepegawaian dan anggaran kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan mengacu pada rencana strategis Kantor;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Kantor;
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan dan pengendalian anggaran Kantor;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum;
 - f. Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Seksi Pengelolaan Arsip Daerah

Pasal 5

- (1) Seksi Pengelolaan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengelolaan Arsip Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan mengacu pada kerja kantor;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan arsip daerah;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan dan penggunaan arsip statis;
 - d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan arsip dinamis;
 - e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Arsip Daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan bidang perpustakaan.

(2) Untuk ...

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan mengacu pada program kerja kantor;
- b. Pelaksanaan perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perpustakaan di bidang koleksi deposit, pengembangan bahan pustaka, otomasi dan preservasi;
- c. Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka;
- d. Pelaksanaan pengelolaan karya cetak dan karya rekam;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan jasa informasi;
- f. Pelaksanaan pembinaan perpustakaan dan pelayanan pemakaian perpustakaan daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Telematika

Pasal 7

- (1) Seksi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan telematika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Telematika mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan ...

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan mengacu pada program kerja kantor;
- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan telematika;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi/telematika yang berhubungan dengan piranti keras, piranti lunak ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan teknologi informasi, sistem jaringan dan e-government;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang sistem informasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Telematika;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Arsip, perpustakaan dan telematika di wilayah dapat dibentuk UPT Arsip, Perpustakaan dan Telematika yang melingkupi satu kecamatan atau lebih.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi UPT Arsip, Perpustakaan dan Telematika ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Keputusan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ...

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Depok di bidang Arsip, Perpustakaan dan Telematika, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Kantor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

Bagian Kedua
P e l a p o r a n
Pasal 12

- (1). Kepala Kantor wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4). Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 13

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan kantornya.

BAB VI ...

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pada kantor dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Penyesuaian atas Keputusan Walikota ini, dilaksanakan selambat-lambatnya Tanggal 1 Januari 2006.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2004
WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,


Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2004 NOMOR 57 SERI D

Paragraf 2

Tugas:

Pasal 68

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengawasan.

Paragraf 3

Fungsi:

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (68) Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari:

Kepala Badan, yang membawahkan:

- a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. Bidang Aset dan Belanja Daerah membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Aset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Belanja Daerah;
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapanbelas

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 71

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 72

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Arsip, Perpustakaan dan Telematika.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (72) Peraturan Daerah ini Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika terdiri dari :

- Kepala Kantor, yang membawahkan:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Arsip Daerah ;
 - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 - d. Seksi Telematika;

- e. Unit Pelaksana Teknis Kantor;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilanbelas

Kantor Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 75

Kantor Pemadam Kebakaran merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 76

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 77

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (76) Peraturan Daerah ini Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 19 Nopember 2003
WALIKOTA DEPOK,

III

H. BADRUL KAMAL

Dijundangkan di Depok
Pada tanggal 21 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

GIL

Drs. A. MOCH. HARRIS
NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 34 SERID

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

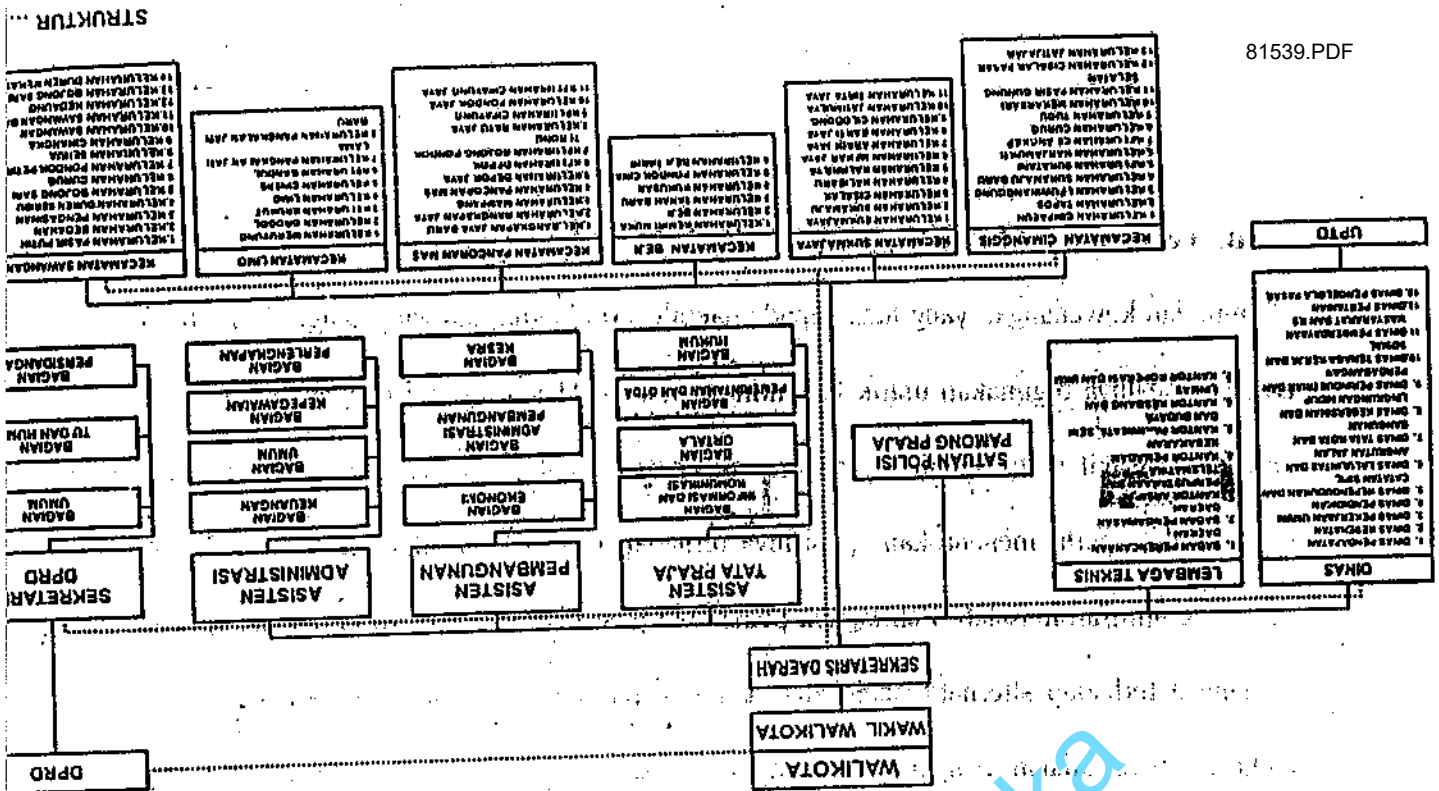
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR : 16 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 Nopember 2003

WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	SEKRETARIS DAERAH
----------	----------------	-------------------

**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

LEMBAGA TEKNIK

1. DAVIS, PETERSON
2. DAVIS, PETERSON
3. DAVIS, PETERSON
4. DAVIS, PETERSON
5. DAVIS, PETERSON
6. DAVIS, PETERSON
7. DAVIS, PETERSON
8. DAVIS, PETERSON
9. DAVIS, PETERSON
10. DAVIS, PETERSON
11. DAVIS, PETERSON
12. DAVIS, PETERSON
13. DAVIS, PETERSON
14. DAVIS, PETERSON
15. DAVIS, PETERSON
16. DAVIS, PETERSON
17. DAVIS, PETERSON
18. DAVIS, PETERSON
19. DAVIS, PETERSON
20. DAVIS, PETERSON
21. DAVIS, PETERSON
22. DAVIS, PETERSON
23. DAVIS, PETERSON
24. DAVIS, PETERSON
25. DAVIS, PETERSON
26. DAVIS, PETERSON
27. DAVIS, PETERSON
28. DAVIS, PETERSON
29. DAVIS, PETERSON
30. DAVIS, PETERSON
31. DAVIS, PETERSON
32. DAVIS, PETERSON
33. DAVIS, PETERSON
34. DAVIS, PETERSON
35. DAVIS, PETERSON
36. DAVIS, PETERSON
37. DAVIS, PETERSON
38. DAVIS, PETERSON
39. DAVIS, PETERSON
40. DAVIS, PETERSON
41. DAVIS, PETERSON
42. DAVIS, PETERSON
43. DAVIS, PETERSON
44. DAVIS, PETERSON
45. DAVIS, PETERSON
46. DAVIS, PETERSON
47. DAVIS, PETERSON
48. DAVIS, PETERSON
49. DAVIS, PETERSON
50. DAVIS, PETERSON
51. DAVIS, PETERSON
52. DAVIS, PETERSON
53. DAVIS, PETERSON
54. DAVIS, PETERSON
55. DAVIS, PETERSON
56. DAVIS, PETERSON
57. DAVIS, PETERSON
58. DAVIS, PETERSON
59. DAVIS, PETERSON
60. DAVIS, PETERSON
61. DAVIS, PETERSON
62. DAVIS, PETERSON
63. DAVIS, PETERSON
64. DAVIS, PETERSON
65. DAVIS, PETERSON
66. DAVIS, PETERSON
67. DAVIS, PETERSON
68. DAVIS, PETERSON
69. DAVIS, PETERSON
70. DAVIS, PETERSON
71. DAVIS, PETERSON
72. DAVIS, PETERSON
73. DAVIS, PETERSON
74. DAVIS, PETERSON
75. DAVIS, PETERSON
76. DAVIS, PETERSON
77. DAVIS, PETERSON
78. DAVIS, PETERSON
79. DAVIS, PETERSON
80. DAVIS, PETERSON
81. DAVIS, PETERSON
82. DAVIS, PETERSON
83. DAVIS, PETERSON
84. DAVIS, PETERSON
85. DAVIS, PETERSON
86. DAVIS, PETERSON
87. DAVIS, PETERSON
88. DAVIS, PETERSON
89. DAVIS, PETERSON
90. DAVIS, PETERSON
91. DAVIS, PETERSON
92. DAVIS, PETERSON
93. DAVIS, PETERSON
94. DAVIS, PETERSON
95. DAVIS, PETERSON
96. DAVIS, PETERSON
97. DAVIS, PETERSON
98. DAVIS, PETERSON
99. DAVIS, PETERSON
100. DAVIS, PETERSON



Instruksi Presiden No. 3/2003

Rabu, 9 Juni 2004 11:18 WIB

Instruksi Presiden Republik Indonesia**No. 3 Tahun 2003****Tentang****Kebijakan dan Strategi Nasional****Pengembangan E-Government****Presiden Republik Indonesia,****Menimbang:**

- a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
- b. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*;
- d. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* secara nasional.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN:**Kepada:**

1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

KETIGA : Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI